

**PENGARUH PENGGUNAAN BASIS AKRUAL
DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP
MANAJEMEN LABA DENGAN
PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL
*INTERVENING***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ANNISA MOTIK KURNIASARI

NIM. 145030407111015



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2018

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juli 2018

Jam : 09.00 – 10.00

Skripsi atas nama : Annisa Motik Kurniasari

Judul : PENGARUH PENGGUNAAN BASIS AKRUAL DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Dan Dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Priandhita Sukowidianti Asmoro, SE., MSA. Ak.
NIP. 198611172015042002

Anggota,

Muhammad Saifi, Dr. Drs. M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota,

Mirza Maulinarhadi R, SE., MSA. AK
NIP. 20120184 1211 2 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Annisa Motik Kurniasari menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari makalah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 9 Juli 2018



Annisa Motik Kurniasari



CURRICULUM VITAE

BIODATA

Nama : Annisa Motik Kurniasari
Nomor Induk Mahasiswa : 145030407111015
Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 16 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : motikannisagg@gmail.com
Alamat Asal : Jalan Puntuk 18 RT/RW 02/01, Kelurahan
Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi
Jawa Timur.



RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. MI Islamiyah Madiun Tahun 2002 - 2008
2. SMPN 1 Madiun Tahun 2008 - 2011
3. SMAN 1 Madiun Tahun 2011 - 2013

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staff Divisi Pendidikan Pelatihan Tax Center FIA UB (2016)
2. Ketua Divisi Pendidikan Pelatihan Tax Center FIA UB (2017)

PENGALAMAN KEPANITIAAN

1. Divisi Perlengkapan Pengisian E-Filing Tax Center FIA UB (2016)
2. Divisi Acara Pengisian E-Filing Tax Center FIA UB (2017)
3. Mentor Pelatihan Pengisian E-SPT HIMAPAJAK (2017)
4. Divisi Acara Diskusi Pajak Tax Center FIA UB (2018)
5. Divisi Konsumsi TAX Goes To School (2017)
6. Divisi Perlengkapan TAX Goes To School (2018)
7. Staff Relawan Pajak DJP 2018

HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYAKU

KEPADA IBUKU DAN BAPAKKU TERCINTA

SERTA SEMUA SAHABAT



RINGKASAN

Annisa Motik Kurniasari, 2018, **Pengaruh Penggunaan Basis AkruaI dan Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Dengan Perencanaan Pajak Sebagai Variabel *Intervening***). Priandhita Sukowidyanti Asmoro, S.E., MSA. Ak., 128 Halaman + xvii.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh penggunaan basis akrual dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba dengan perencanaan pajak sebagai variabel *intervening*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini meliputi Basis AkruaI (AKRU), Pajak Tangguhan (DEFERRED), Manajemen Laba (EARNING), dan Perencanaan Pajak (TAXPLAN). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada website resmi Bursa Efek Indonesia dan pada periode tahun 2014-2016. Sampel yang digunakan sebanyak 162, diperoleh dari perhitungan menggunakan *purposive sampling*. Data diperoleh secara tidak langsung dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis jalur yang diolah menggunakan SmartPLS 2.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Basis AkruaI (AKRU) berpengaruh positif terhadap Perencanaan Pajak (TAXPLAN); Basis AkruaI (AKRU) berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba (EARNING); Basis AkruaI (AKRU) berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba (EARNING) melalui Perencanaan Pajak (TAXPLAN); Pajak Tangguhan (DEFERRED) berpengaruh positif terhadap Perencanaan Pajak (TAXPLAN); Pajak Tangguhan (DEFERRED) berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba (EARNING); Pajak Tangguhan (DEFERRED) berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba (EARNING) melalui Perencanaan Pajak (TAXPLAN).

Kata Kunci : Basis AkruaI, Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Manajemen Laba.

SUMMARY

Annisa Motik Kurniasari, 2018 *The Effect of Using Accrual Basis And Deferred Tax On Earning Management With Tax Planning As A Intervening Variable*. Priandhita Sukowidyanti Asmoro, S.E., MSA. Ak., 128 Halaman + xvii.

This study aims to determine and explain the effect of using accrual basis and deferred tax on earning management with tax planning as a intervening variable. The type of this research is explanatory research with quantitative approach. The variables in this study include Accrual Basis (AKRU), Deferred Tax (DEFERRED), Tax Planning (TAXPLAN), and Earning Management (EARNING). The Population in this research is all manufactur company registered in Indonesian Stock Exchange and use Finance Report. The samples are used 174 companies, obtained from calculation using purposive sampling. The analysis used descriptive analysis and path analysis which was processed by using SmartPLS 2.0 for windows.

The result of the analysis show that: Accrual Basis (AKRU) has positive effect in Tax Planning (TAXPLAN); Accrual Basis (AKRU) has positive effect in Earning Management (EARNING); Accrual Basis (AKRU) has positive effect in Earning Management (EARNING) pass through Tax Planning (TAXPLAN); Deferred Tax (DEFERRED) has positive effect in Tax Planning (TAXPLAN); Deferred Tax (DEFERRED) has positive effect in Earning Management (EARNING); Deferred Tax (DEFERRED) has positive effect in Earning Management (EARNING) pass through Tax Planning (TAXPLAN).

Keyword : Accrual Basis, Deferred Tax, Tax Planning, and Earning Management.

KATA PENGANTAR

Puji sukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Penggunaan Basis Akrual dan Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Dengan Perencanaan Pajak Sebagai Variabel *Intervening*”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya petunjuk, bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Saparila Worokinasih, Dr., S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA., Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak dukungan dan pengarahan selama proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Kedua orang tua saya, bapak Lasimo dan ibu Subiastutik yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan khususnya doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kelima beloved cute kitties ku, Chiki, Grey, Chiko, Bleki, Mubel yang selalu menghibur dan menjadi vitamin peneliti dengan segala tingkah laku, kelucuan, dan manjanya.
7. Sahabat-sahabatku, Amelinda, Meris, Novi, Scheilla, Yana, Sari, Popy, Julaika, Nadiah, Zulfa dan yang lainnya yang telah membantu dalam bentuk apapun.
8. My visual supporting system, Chanyeol, Daniel, Ong, Yoona, Sooyoung, Taeyeon, Seohyun, Tiffany, Hyoyeon, Sunny, Yuri, Baekhyun, Kai, Sehun, Suho, DO, Chen, Lay, Xiumin, Jaehwan, Jisung, Jihoon, Woojin, Minhyun, Sungwoon, Daehwi, Guanlin, dan Jinyoung.
9. Keluarga Tax Center FIA UB, mbak Dwiap, mas Rahmat, mas Ali, mbak Ifah, mbak April, mbak Siti, mbak Fe, Sari, Novi, Laila, Dinda, Mondus, Bobi, Aje, Dita, Leo, Gesti, Eldy, Christi, Murni, Tika, Nur.
10. Teman-teman seperjuangan FIA Perpajakan 2014 semoga sukses selalu untuk kita semua.
11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis. Semoga karya skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 2018

Penulis



DAFTAR ISI

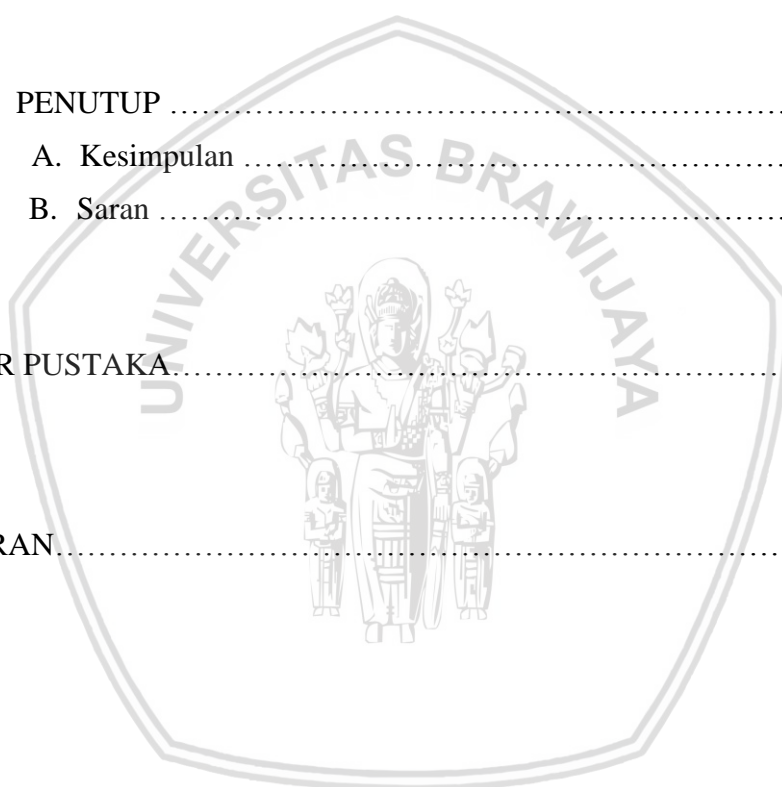
	Halaman
COVER	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Empiris	14
B. Tinjauan Teoritis	16
1. Teori Agensi	16
2. Teori Akuntansi Positif	18
3. Laporan Keuangan	21
a. Jenis Laporan Keuangan	21
b. Tujuan Laporan Keuangan	24



4. Basis Akruial	25
a. Pengertian Basis Akruial	25
b. Jenis Basis Akruial	26
c. Model Basis Akruial	27
5. Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasar PSAK No.46	29
a. Liabilitas Pajak Tangguhan	29
b. Aset Pajak Tangguhan	32
6. Manajemen Laba	33
a. Pengertian Manajemen Laba	33
b. Jenis Manajemen Laba	35
c. Motivasi Manajemen Laba	36
d. Metode Manajemen Laba	38
7. Perencanaan Pajak	40
a. Pengertian Perencanaan Pajak	40
b. Tahapan Dalam Perencanaan Pajak	41
c. Tujuan Perencanaan Pajak	43
d. Strategi Dalam Perencanaan Pajak	44
C. Perumusan Hipotesis	45
1. Pengaruh Basis Akruial Terhadap Perencanaan Pajak.....	45
2. Pengaruh Basis Akruial Terhadap Manajemen Laba	47
3. Pengaruh Basis Akruial Terhadap Manajemen Laba Melalui Perencanaan Pajak	49
4. Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Perencanaan Pajak	51
5. Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	54
6. Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Melalui Perencanaan Pajak	57
D. Model Konsep dan Model Hipotesis	60
1. Model Konsep	60
2. Model Hipotesis	62
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	63
C. Jenis dan Sumber Data	69

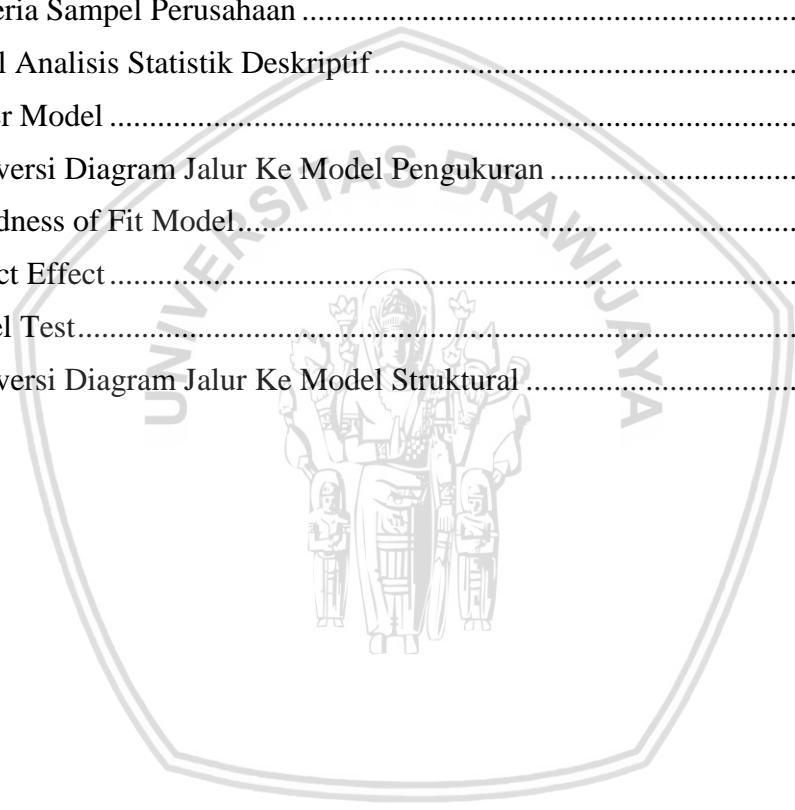


D. Populasi dan Sampel	69
E. Metode Pengumpulan Data	73
F. Metode Analisis Data	73
BAB IV PEMBAHASAN	77
A. Objek Penelitian	77
B. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis	77
C. Pembahasan	92
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	113



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Penelitian Terdahulu	14
2.	Definisi Operasional Variabel.....	68
3.	Penerimaan Pajak Tahun 2014-2016	70
4.	Kriteria Sampel Perusahaan	72
5.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	78
6.	Outer Model	84
7.	Konversi Diagram Jalur Ke Model Pengukuran	85
8.	Goodness of Fit Model.....	87
9.	Direct Effect	88
10.	Sobel Test.....	90
11.	Konversi Diagram Jalur Ke Model Struktural	91



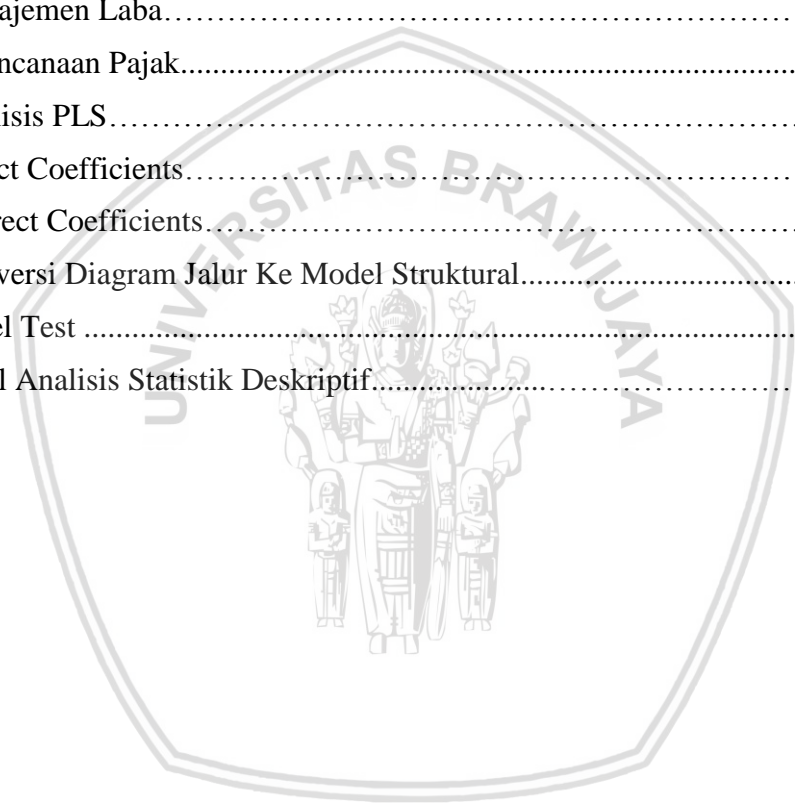
DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Model Konsep	61
2.	Model Hipotesis	62
3.	Model Analisis Jalur	76
4.	Diagram Jalur	81
5.	<i>Inner Model</i>	82
6.	<i>Outer Model</i>	83



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Daftar Perusahaan Manufaktur Sampel.....	113
2.	Basis Akreal.....	115
3.	Pajak Tangguhan.....	117
4.	Manajemen Laba.....	119
5.	Perencanaan Pajak.....	121
6.	Analisis PLS.....	123
7.	Direct Coefficients.....	125
8.	Indirect Coefficients.....	125
9.	Konversi Diagram Jalur Ke Model Struktural.....	125
10.	Sobel Test	126
11.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan memuat informasi keuangan yang berperan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi *principal*. Namun dalam prakteknya, masih banyak informasi keuangan yang kualitasnya tidak sesuai dengan dasar-dasar penyusunan laporan keuangan karena adanya perbedaan kepentingan pihak-pihak yang terkait. Seperti diketahui bersama, dalam sebuah perusahaan terdapat beberapa pihak yang berkepentingan. Pemilik perusahaan (*principal*) berkepentingan terhadap modal yang ditanamkan, pihak manajemen (*agent*) berkepentingan terhadap bonus yang akan diperolehnya, dan juga pemerintah berkepentingan terhadap pajak yang akan dikenakan pada perusahaan. Antara para pihak yang berkepentingan tersebut tidak jarang terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*), dimana masing-masing pihak ingin memaksimalkan kepentingan pribadinya (Arifah, 2012). Misalnya, *agent* berusaha memanipulasi laporan keuangan agar *principal* merasa puas dengan kinerjanya selama mengelola perusahaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya laba dari periode ke periode.

Pihak manajemen memanipulasi laba dalam kejadian-kejadian penting seperti *annual general meetings*, *initial public offerings*, dan *seasoned equity offerings* (Zeng, 2014). *Agent* cenderung menampilkan kinerja yang sesuai dengan apa yang ingin ditampilkan (Tan dan Jamal, 2005). Banyak *agent* yang memanfaatkan

peluang untuk melakukan manajemen laba pada perusahaannya untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan antara lain adanya motivasi bonus agar kinerjanya lebih baik atau meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan sehingga laba bersih besar (Suranggane, 2007).

Manajemen laba merupakan kondisi dimana *agent* mengelola serta mengatur laba agar mencapai tingkat laba tertentu sesuai keinginan *agent*. Manajemen laba melalui perencanaan pajak bertujuan untuk menghasilkan laba bersih yang tinggi dengan menekan pemenuhan kewajiban perpajakan. Aktivitas perencanaan pajak merupakan salah satu cara membuat jumlah laba sebelum pajakturuyang juga akan mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan (Hu *et al.*, 2015).

Keinginan *agent* untuk menekan pajak yang terutang sekecil mungkin membuat *agent* cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Tindakan untuk meminimalkan beban pajak disebut perencanaan pajak (*tax planning*) (Suandy, 2008). Perencanaan pajak merupakan tindakan legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam bingkai undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Peran perencanaan pajak sebagai alat manajemen laba dapat dijelaskan dengan Teori Akuntansi Positif dalam hipotesis ketiga yaitu *The Political Cost Hypothesis* (Scott, 2009). Teori tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, salah satunya pajak beserta sanksinya, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba sebelum pajak. Namun, apabila *agent* diketahui sengaja menghindari biaya politik, maka biaya politik akan semakin besar karena utang

pajak dan sanksi akan bertambah. *Agent* melakukan perencanaan pajak agar pajak yang terutang kecil dengan menghasilkan laba fiskal kecil sehingga menghasilkan laba bersih yang tinggi. Oleh karena itu, kuat dugaan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba pada perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumomba dan Hutomo (2012) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh untuk mendeteksi manajemen laba. Hal ini terbukti dari *agent* melakukan manajemen laba melalui perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak penghasilan agar perusahaan membayar pajak serendah mungkin serta meningkatkan daya tarik investor untuk membeli saham perusahaan dan perusahaan memperoleh tambahan modal dari investor karena laba bersih tinggi. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Ifada dan Wulandari (2015) yang menganalisis pengaruh antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bukti empiris bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur. Hal tersebut bermakna semakin tingginya kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan tidak berbanding lurus dengan praktek manajemen laba yang terjadi. Hasil tersebut dikarenakan perusahaan non-manufaktur tidak sensitif terhadap tingkat laba bersih sehingga tidak berpengaruh pada pajak. Oleh sebab itu, perencanaan pajak tidak memberikan kontribusi banyak terhadap manajemen laba.

Penggunaan basis akrual merupakan salah satu instrumen *agent* untuk melakukan perencanaan pajak. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

No. 1 mengharuskan perusahaan menggunakan basis akrual dalam menyusun laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan lebih sulit dikendalikan apabila transaksi diakui dengan basis akrual karena transaksi dicatat pada saat waktu kejadian. Basis akrual juga menunjukkan gambaran penghasilan dan biaya yang lebih baik.

Namun, dalam penelitian Yona (2018) menyatakan bahwa basis akrual berpengaruh dalam praktik perencanaan pajak yang bermakna semakin banyak transaksi diakui menggunakan metode basis akrual maka semakin tinggi tingkat praktik perencanaan pajak yang dilakukan karena pengakuan biaya yang besar akan membuat labasebelum pajak kecil dan menghasilkan pajak yang rendah. Penggunaan basis akrual memberi kesempatan kepada *agent* untuk memanipulasi laporan keuangan karena tidak ada bukti kas fisik masuk dan keluar (Sulistyanto, 161:2014). Hal ini sesuai dengan *The Political Cost Hypothesis*. Perusahaan dengan *Political Cost* besar cenderung menggunakan metode akuntansi untuk menurunkan labasebelum pajak sehingga pajak yang terutang dapat ditekan dan sanksi pajak tidak bertambah. Namun, dengan perusahaan diketahui menghindari biaya politik dengan sengaja, maka sanksi akan semakin besar karena utang pajak akan bertambah. Utang pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memiliki pengertian pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Basis akrual masih banyak digunakan untuk mendeteksi manajemen laba dan masih dapat menarik sebagian besar perhatian para ilmuwan (Vladu dan Cuzdriorean, 2014). Basis akrual juga berkaitan dengan asumsi tentang informasi atau *asymmetric information* pada Teori Agensi yang menekankan adanya ketidakseimbangan informasi yang diterima *principal* dan *agent*. Dalam hal ini manajemen tidak menyajikan keseluruhan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh *principal*. Oleh karena itu, pendapatan dapat diakui di periode selanjutnya dan *agent* dapat mengatur pengakuan beban lebih cepat. Adanya pengakuan beban yang lebih cepat diduga dapat memperkecil laba sebelum pajak dan juga menurunkan tingkat pajak sehingga laba bersih dapat terus meningkat.

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya (Resmi, 2009). Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mulai menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan (PPH) pada tahun 2001. Sebelum ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46, perusahaan hanya menghitung dan mengakui besarnya beban pajak penghasilan untuk tahun berjalan saja tanpa menghitung dan mengakui pajak tangguhan.

Pajak tangguhan dapat dijadikan instrumen dalam melakukan perencanaan pajak. Pajak tangguhan juga berguna dalam mendeteksi manajemen laba (Blaylock, 2010). Pajak tangguhan disajikan di neraca yang terpisah dari aset lancar dan kewajiban lancar. Pajak tangguhan merupakan proksi dari beda

temporer yang terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Beda temporer menyebabkan penghitungan beban pajak atas jumlah laba fiskal berbeda dengan laba menurut komersial, misalnya penyusutan dan amortisasi. Apabila berbicara tentang pajak tangguhan, tidak terkait dengan perbedaan permanen. Beda permanen merupakan pengakuan suatu penghasilan atau biaya akibat adanya perbedaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen. Perbedaan permanen dan perbedaan temporer menimbulkan *book tax differences* yang berarti koreksi fiskal dan terbagi menjadi koreksi positif menghasilkan aset pajak tangguhan dan koreksi negatif yang menghasilkan liabilitas pajak tangguhan (Djamaluddin, 2008 dalam Hakim, 2015).

Aset pajak tangguhan merupakan aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang-Undang Pajak (Waluyo, 2008:217). Aset pajak tangguhan terjadi apabila laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal sehingga pajak yang dibayar di masa yang akan datang lebih kecil maka diakui sebagai aset. Jenis manajemen laba salah satunya *income minimization* yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan laba bersih masa yang akan datang dengan memindahkan beban pajak ke masa kini. Hal itulah yang menjadi alasan peneliti untuk mengambil aset pajak tangguhan sebagai alat manajemen laba. Sesuai penelitian Bauman *et al.*, (2000) mengungkapkan bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan untuk merencanakan laba. Aset pajak

tanggungan akan menghasilkan pajak yang tinggi di masa sekarang tetapi memiliki potensi hutang pajak yang rendah di masa yang akan datang.

Liabilitas pajak tanggungan juga dapat dijadikan sebagai indikator manajer melakukan manajemen laba. Sesuai dengan salah satu jenis manajemen laba yaitu *income maximization* yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan laba bersih masa kini dengan memindahkan beban pajak ke masa mendatang. Hal ini searah dengan konsep liabilitas pajak tanggungan yang membebaskan pajak masa kini lebih kecil dibandingkan dengan masa mendatang. Liabilitas pajak tanggungan terjadi apabila beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar daripada beban pajak menurut akuntansi fiskal. Liabilitas pajak tanggungan secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan menghindari kerugian (Phillipset *al.*, 2003). Liabilitas pajak tanggungan berkaitan erat dalam mendeteksi perilaku manajemen laba untuk meminimalkan pajak yang seharusnya dibayarkan sehingga memperbesar laba bersih. Liabilitas pajak tanggungan menghasilkan pajak yang kecil di masa sekarang agar manajemen dapat memperoleh bonus.

Penelitian yang dilakukan Negara dan Saputra (2017) menemukan bukti empiris bahwa beban pajak tanggungan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2015 karena perusahaan dapat memanfaatkan celah PSAK 46 untuk memilih prinsip akuntansi sesuai kebutuhan sehingga dapat mengelola beban pajak tanggungan yang dimiliki sehingga berpengaruh pada manajemen laba. Hakim (2015) juga mengungkapkan bahwa aset pajak tanggungan memiliki

pengaruh positif terhadap manajemen laba karena PSAK 46 mengatakan perusahaan dapat mengakui dan menilai kembali aset pajak tangguhan sehingga memberika kebebasan untuk memilih kebijakan akuntansi untuk menilai aset pajak tangguhan sehingga berpnegaruh pada manajemen laba.

Sehubungan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan Ifada dan Wulandari (2015) menganalisis pengaruh antara pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bukti empiris bahwapajak tangguhan memiliki pengaruh positif dengan probabilitas perusahaan non-manufaktur untuk melakukan manajemen laba karena perusahaan non-manufaktur cenderung melakukan perataaan laba atau pengurangan fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga pajak tangguhan memiliki kontribusi pada praktek tersebut.

Praktik manajemen laba yang dilakukan melalui perencanaan pajak cenderung terjadi pada perusahaan *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha menampilkan laporan keuangan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sebaik mungkin dan membagi dividen yang besar. Hal ini terjadi karena perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public* (Suandy, 2011). Setiap pengambilan keputusan *principal* berpedoman pada pelaporan keuangan karena laporan tahunan berisi pengungkapan informasi yang dapat membantu *principal* dalam pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan lebih memperhatikan informasi laba, manajemen laba berlaku di antara perusahaan yang terdaftar (Hu *et al.*, 2015).

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena menurut Watts dan Zimmerman (1990) dalam Jao dan Pagalung (2011) perusahaan-perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi lebih cenderung memilih metode akuntansi untuk mengurangi laba sebelum pajak yang dilaporkan dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil agar pajak yang terutang rendah dan sanksi tidak bertambah. Indonesia juga menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak dapat menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diindikasikan memberikan kesempatan perusahaan manufaktur untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Perusahaan manufaktur juga merupakan perusahaan yang paling dominan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terdiri dari beberapa sektor yaitu industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan menganalisis dan melakukan pembuktian secara empiris, yaitu : **Pengaruh Penggunaan Basis AkruaI dan Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Dengan Perencanaan Pajak Sebagai Variabel *Intervening*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah penggunaan basis akrual berpengaruh terhadap perencanaan pajak perusahaan ?
2. Apakah penggunaan basis akrual berpengaruh terhadap manajemen labaperusahaan?

3. Apakah penggunaan basis akrual berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan melalui perencanaan pajak ?
4. Apakah penggunaan pajak tangguhan berpengaruh terhadap perencanaan pajak perusahaan ?
5. Apakah pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen labaperusahaan ?
6. Apakah pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen labaperusahaan melalui perencanaan pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis penggunaan basis akrual terhadap perencanaan pajak perusahaan.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan basis akrual terhadap manajemen labaperusahaan.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen labaperusahaan.
4. Mengetahui dan menganalisis penggunaan pajak tangguhan terhadap perencanaan pajak perusahaan.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan basis akrual berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan melalui perencanaan pajak.

6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba perusahaan melalui perencanaan pajak.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Mampu mengkonfirmasi Teori Agensi dan Teori Akuntansi Positif yang digunakan dalam menganalisis pengaruh variabel basis akrual, pajak tangguhan terhadap manajemen laba melalui perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau penelitian terdahulu bagi penelitian di masa mendatang.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai pengaruh penggunaan basis akrual, pajak tangguhan, dan perencanaan pajak dalam menjelaskan manajemen laba.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan yang

berkaitan dengan basis akrual, pajak tangguhan, manajemen laba, dan perencanaan pajak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah secara Teoritis, empiris, dan normatif beserta alasan-alasan yang mendukung rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Uraian berikutnya, rumusan masalah berisi tentang masalah-masalah yang akan dicari jawabannya melalui analisis data. Bab ini juga berisi tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan Teori-Teori yang mendasari penelitian ini, seperti hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji. Uraian berikutnya terkait permasalahan dan penjelasan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Teori yang dimaksud yang terkait dengan basis akrual, pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan manajemen laba.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan prosedur menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dengan menggunakan langkah-

langkah sistematis. Adapun metode dalam penelitian ini terdiri atas jenis penelitian, lokasi penelitian, serta variabel dan pengukuran. Bab ini juga berisi penjelasan terkait populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan deskripsi statistik variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan. Uraian berikutnya, pengujian melalui *software* SmartPLS 2.0 dan penjabaran hasil analisis data. Bab ini juga menjelaskan interpretasi hasil penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah, serta berbagai keterbatasan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dalam penelitian. Kesimpulan diambil dan ditunjukkan sebagai representasi dari seluruh hasil penelitian. Saran ditujukan oleh peneliti bagi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian ini menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai dasar, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Phillips *et al.*, (2003), Ifada dan Wulandari (2015), dan Aditama dan Purwaningsih (2014). Penelitian Phillips *et al.*, (2003) hanya menggunakan pajak tangguhan sebagai variabel independen. Sementara itu, penelitian ini juga menambahkan variabel independen basis akrual. Penelitian Ifada dan Wulandari (2015) dan Aditama dan Purwaningsih (2014) menggunakan perencanaan pajak sebagai variabel independen. Sedangkan, penelitian ini menggunakan perencanaan pajak sebagai variabel *intervening*. Keterbaharuan penelitian ini menambahkan perencanaan pajak sebagai variabel *intervening*. Keterbaharuan lainnya yaitu periode penelitian ini adalah tahun 2014-2016 dikarenakan pertimbangan bahwa terdapat penurunan tingkat penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar 10% apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang diindikasikan dipengaruhi oleh manajemen laba melalui perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang diperoleh melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Phillips <i>et al.</i> , (2003)	<i>Earnings Management: New Evidence Based on</i>	Variabel Independen : Beban Pajak Tangguhan	Kuantitatif	<i>Deferred Tax Expense</i> dapat melengkapi langkah-langkah akrual dalam

		<i>Deferred Tax Expense</i>	Variabel Dependen : Manajemen Laba		mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan penghasilan dan untuk menghindari kerugian.
2.	Aditama dan Purwani ngsih (2014)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufakt ur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen : Perencanaa n Pajak Variabel Dependen : Manajemen Laba	Kuantitatif	Perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
3.	Ifada dan Wulanda ri (2015)	<i>The Effect Of Deferred Tax And Tax Planning Toward Earnings Management Practice: An Empirical Study On Non Manufacturin g Companies Listed In Indonesia Stock Exchange In The Period Of 2008-2012</i>	Variabel Independen : Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaa n Pajak Variabel Dependen : Manajemen Laba	Kuantitatif	Pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan perencanaan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan praktik pengelolaan laba.

Sumber : diolah peneliti, 2018

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Agensi

Teori Agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Suatu perusahaan terdiri atas pemegang saham yang merupakan *principal* dan *agent* yaitu manajemen yang mengelola perusahaan. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Teori Agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Govindarajan, 2005). Menurut Eisenhardt (1989), Teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu :

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara *principal* dan *agent*.

c. Asumsi tentang informasi

Asymmetric Information (AI), yaitu informasi yang asimetris atau tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang

tidak sama antara *principal* dan *agent*. Dalam hal ini *principal* seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha *agent*, namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh *principal* tidak seluruhnya disajikan. Akibatnya informasi yang diperoleh *principal* kurang lengkap sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja *agent* yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan *principal* yang telah dipercayakan kepada *agent*.

Adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri) dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan *principal* untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut antara lain adalah :

- a. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika *agent* tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
- b. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh *agent* benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan Teori Agensi. Sebagai *agent*, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para *principal* dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Terdapat dua kepentingan

yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat keuntungan yang diinginkan daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut *agent* sebagai manusia akan bertindak oportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Perilaku oportunistik menyebabkan *agent* bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. *Agent* sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan *principal*. *Agent* seharusnya berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada *principal*. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* disebut dengan *agency problems*. Salah satu penyebabnya adalah adanya *asymmetric information*. Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya kondisi asimetri informasi (*asymmetry information*). Asimetri antara *agent* dengan *principal* dapat memberikan kesempatan kepada *agent* untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan *principal* mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

2. Teori Akuntansi Positif

Ada tiga hipotesis dalam Teori Akuntansi Positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan menurut Sulistyanto (2014:45). Hipotesis ini

menekankan pentingnya penyerahan wewenang pengelolaan perusahaan dari *principal* kepada *agent* yang mampu menjalankan perusahaan dengan baik.

Hipotesis-hipotesis tersebut sebagai berikut :

a. *Bonus Plan Hypothesis*

Rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi.

b. *Debt (equity) Hypothesis*

Perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya.

c. *Political Cost Hypothesis*

Perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya.

Scott (2009:284) menyebutkan bahwa *positive accounting theory is concerned with predicting such actions as the choices of accounting policies by firm managers and how managers will respond to proposed new accounting standards*. Teori Akuntansi Positif berhubungan dengan prediksi suatu keputusan dalam prinsip akuntansi oleh *agent* dan bagaimana *agent* akan memberikan respon terhadap standar akuntansi yang baru. Teori Akuntansi

Positif mengasumsikan bahwa *agent* mempunyai sifat yang rasional seperti investor dan *agent* akan memilih kebijakan akuntansi yang memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Scott (2009:287-288) menyatakan terdapat tiga hipotesis dari Teori Akuntansi Positif, yaitu:

1. *The Bonus Plan Hypothesis*

Agent akan memilih prosedur akuntansi yang melaporkan penghasilan dari masa yang akan datang ke periode berjalan. Manajer menginginkan bonus yang tinggi, jika bonus bergantung pada laba yang dilaporkan, maka manajer akan memaksimalkan bonus mereka dengan melaporkan penghasilan setinggi mungkin. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada *agent* tidak hanya memotivasi *agent* untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi *agent* untuk melakukan kecurangan manajerial. Agar dapat mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, *agent* mempermainkan besar kecilnya angka-angka dalam laporan keuangan sehingga bonus itu selalu didapat setiap tahun. Hal ini yang kemudian mengakibatkan pemilik mengalami kerugian ganda, yaitu memperoleh informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah bonus.

2. *The Debt Covenants Hypothesis*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi perusahaan dalam perjanjian hutang. Perusahaan memiliki rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung

melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang-piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi dan keputusan bisnis yang keliru, akibatnya terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya.

3. *The Political Cost Hypothesis*

Perusahaan yang besar dengan tingkat laba yang tinggi lebih banyak dijadikan obyek implementasi peraturan maupun kebijakan pemerintah, seperti pengenaan pajak penghasilan tinggi, diwajibkan untuk memenuhi standar kinerja yang lebih tinggi seperti tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sebagainya.

3. Laporan Keuangan

a. Jenis Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan lengkap menurut PSAK 1 (2015) terdiri dari :

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- 3) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- 4) Laporan arus kas selama periode;
- 5) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;

- 6) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan
- 7) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Laporan keuangan yang lengkap menurut SAK ETAP (2009) meliputi :

- 1) Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut : kas dan setara kas; piutang usaha dan piutang lainnya; persediaan; properti investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; aset dan kewajiban pajak; kewajiban diestimasi; ekuitas.

- 2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur

laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut : penghasilan; beban keuangan; bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; beban pajak; laba atau rugi neto.

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam laporan ini menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di dalamnya pos penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.

4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Berisi ringkasan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan berisi

informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 1 dalam Baridwan (2004:2) dinyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang :

- 1) Berguna bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya.
- 2) Membantu investor dan kreditor dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan uang di masa yang akan datang.
- 3) Menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, pengaruh dari transaksi-transaksi yang mempengaruhi sumber-sumber tersebut.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 1994). Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi

keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

4. Basis Akruwal

a. Pengertian Basis Akruwal

Akuntansi mengenal istilah basis akruwal dan basis kas. Basis yang sering digunakan adalah basis akruwal, prinsip akuntansi Indonesia menghendaki agar perusahaan menggunakan basis akruwal karena metode perhitungan penghasilan dan biaya tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan (Jusup, 2005:174). Menurut PSAK (2009), laporan keuangan disusun berdasarkan akruwal. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Teknik akuntansi berbasis akruwal diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekuitas (Elingga, 2008). Model akruwal melibatkan perhitungan total akruwal.

Konsep akruwal memiliki kelemahan yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengatur angka-angka dalam laporan keuangan, sehingga dapat

digunakan untuk mengubah angka laba yang dihasilkan apabila standar akuntansi memungkinkan melalui praktik manajemen laba. Berdasarkan penelitian Kiswanto (2009) ditemukan bukti bahwa akrual tidak berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari pelaporan penurunan laba. Penelitian Hamzah (2009) mengemukakan bahwa akrual juga tidak berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba pada saat menghindari pelaporan penurunan laba. Namun, hal-hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Suranggane (2007) yang menunjukkan bahwa akrual memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Budiman (2012) yang menemukan bukti bahwa variabel akrual memiliki pengaruh positif signifikan terhadap adanya indikasi praktik manajemen laba. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka diduga ada peranan penggunaan basis akrual yang dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba.

b. Jenis Basis Akrual

1) *Discretionary Accrual* (Akrual Bebas)

Discretionary Accrual adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas, tidak diatur, dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. Akrual bebas muncul akibat diskresi manajemen atau berada di bawah kebijakan manajemen. Hal ini biasanya digunakan sebagai pengukur dalam manajemen laba dan besarnya merupakan hasil modifikasi angka-angka pada

laporan keuangan untuk memenuhi tujuan manajemen sehingga keberadaan *discretionary accrual* menandakan rendahnya kualitas laba. Efek dari kualitas laba yang rendah adalah tidak adanya nilai prediktif dari laba, yang berarti informasi mengenai laba perusahaan ini tidaklah menggambarkan keadaan sesungguhnya dari perusahaan sehingga informasi laba menjadi bias bagi penggunaannya. *Discretionary accrual* dapat dilakukan melalui pemilihan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual namun bersifat subjek dan kontekstual.

2) *Non Discretionary Accrual* (Akrual Tidak Bebas)

Non discretionary accrual adalah dasar akrual yang tidak bebas dan melakukan pengakuan akrual laba yang wajar yang tunduk suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Transaksi tersebut dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan (IAI, 2002).

c. Model Basis Akrual

Perekayasa menaikkan atau menurunkan pendapatan dan beban akrual antara lain dapat dilakukan dengan cara mempercepat pendapatan atau mempercepat beban. Perekayasa laba tersebut termasuk salah satu praktek manajemen laba melalui perekayaan transaksi akrual. Model yang digunakan untuk menghitung total akrual adalah sebagai berikut:

$$TAcc\ it = \frac{EBEI\ it - (CFO\ it - EIDO\ it)}{total\ aset\ t - 1}$$

Sumber : Phillips *et al.*, (2003)

Keterangan:

- TACCit = Total akrual perusahaan i untuk tahun t
 EBEIit = *Earning Before extraordinary item* perusahaan tahun t.
 CFOit = *Cash flow operating activities* perusahaan i untuk tahun t.
 EIDOit = *Extraordinary items & discontinued operations* dari laporan arus kas perusahaan i untuk tahun t.

Model-model akrual menurut Belkaoui (2007) adalah sebagai berikut:

1) Model Healy

Model Healy merupakan model yang relatif sederhana karena menggunakan total akrual (*total accruals*) sebagai proksi manajemen laba. Alasannya karena total akrual memiliki potensi untuk mengungkap cara-cara manajemen laba baik menaikkan maupun menurunkan laba.

$$TAit = (\Delta Cait - \Delta Clit - \Delta Cashit - \Delta STDit - Depit) / (Ait-1)$$

Keterangan:

- TAit = total akrual perusahaan pada periode t.
 $\Delta Cait$ = perubahan dalam aset lancar perusahaan pada periode ke t.
 $\Delta Clit$ = perubahan dalam hutang lancar perusahaan pada periode ke t.
 $\Delta Cashit$ = perubahan dalam kas dan ekuivalen kas perusahaan pada periode ke t
 $\Delta STDit$ = perubahan dalam hutang jangka panjang yang termasuk dalam hutang lancar perusahaan pada periode ke t.
 Depit = biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan pada periode ke t.
 Ait-1 = total aset perusahaan pada periode ke t-1.

2) Model De Angelo

Porsi pilihan dalam model De Angelo adalah perbedaan antara akrual total di tahun peristiwa t disimbolkan dalam aset total (At-1) dan akrual bukan pilihan (NDA_t). Penghitungan akrual bukan pilihan (NDA_t) bergantung pada akrual total

diperiode sebelumnya (T_{At-t}) disimbolkan dengan aset total keseluruhan (A_{t-2}), dengan kata lain:

$$NDA_t = T_{At-1} / A_{t-2}$$

3) Model Jones

Tujuan utama dari model Jones adalah untuk mengendalikan pengaruh perubahan dalam kondisi perusahaan pada akrual bukan pilihan. Akrual bukan pilihan di tahun peristiwa disajikan sebagai berikut:

$$NDA_t = \alpha_1 (1 / A_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_t / A_{t-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{t-1})$$

Keterangan:

NDA_t	= akrual bukan pilihan di tahun t disimbolkan dengan aset total keseluruhan.
ΔREV_t	= penghasilan di tahun t dikurangi penghasilan di tahun t-1.
PPE_t	= aset tetap kotor di tahun t.
A_{t-1}	= aset total diakhir tahun t-1.
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$	= parameter spesifik perusahaan.

5. Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasar PSAK No. 46

Pajak tangguhan adalah pajak yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan basis nilai aset atau liabilitas antara penghitungan menurut akuntansi dan menurut pajak (Ilyas dan Priantara, 2015:73).

a. Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas dilunasi (Ilyas dan Priantara,

2015:73). Apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan PSAK harus diakui sebagai suatu kewajiban (Suandy, 2008:91). Phillips *et al.*, (2003) maupun Yulianti (2005) menambahkan bahwa perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan disebabkan karena dalam penyusutan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan estimasi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan.

Contoh beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal dapat lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan aset tetap. Selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Selisih tersebut akan menghasilkan beban pajak tangguhan.

Beban pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, dimana beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar daripada beban pajak menurut akuntansi fiskal (Waluyo, 2014:277). Semakin besarnya motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba akan menyebabkan semakin besarnya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba perpajakan (Mills dan Newberry, 2001).

Beban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk

tujuan fiskal. Menurut Purba (2009:35) terdapat pengecualian-pengecualian sebagai berikut:

- 1) Beban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan *joint venture* tidak diakui apabila induk perusahaan dan *partner* dapat mengendalikan waktu reversal beda temporer tersebut.
- 2) Beban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan awal *goodwill* yang berasal dari penggabungan usaha.
- 3) Beban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan aset dan kewajiban dalam suatu transaksi yang merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan pajak.

Investor menyadari bahwa penghasilan atau beban pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi merupakan hasil dari akuntansi dengan basis akrual dan merupakan komponen yang bersifat transitori (peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu dan hanya berpengaruh pada periode terjadinya peristiwa tersebut). Dengan kesadaran tersebut, investor akan memahami bahwa kenaikan atau penurunan laba akuntansi hanyalah akibat dari pengakuan konsekuensi pajak karena adanya perbedaan temporer berdasarkan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Kenaikan beban pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui penghasilan lebih awal atau menunda biaya

untuk tujuan pelaporan keuangan komersial pada periode tersebut dibanding tujuan pelaporan pajak. Tindakan perusahaan mengakui penghasilan lebih awal dan menunda biaya mengindikasikan bahwa manajemen melakukan manajemen laba pada laporan keuangan komersial. Semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi beban pajak tangguhan (Phillips *et al.*, 2003).

Pendeteksian manajemen laba dalam penelitian Philips *et al.*, (2003) menyimpulkan bahwa beban pajak tangguhan berguna untuk mendeteksi manajemen laba. penelitian Yulianti (2004) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba, artinya semakin besar nilai variabel beban pajak tangguhan, semakin besar probabilitas perusahaan tersebut melakukan manajemen laba. Selain itu, Yulianti (2004) menemukan bahwa variabel beban pajak tangguhan dan total akrual dapat menjelaskan probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba dengan tingkat keyakinan pada level 95%. Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas maka diduga terdapat pengaruh antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba yang dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan jumlah beban yang diakui dalam laporan laba rugi.

b. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut

akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak (Waluyo, 2014:277). Aset pajak tangguhan menghasilkan beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan (Agoes & Trisnawati, 2010: 244). Aset pajak tangguhan menghasilkan jumlah pajak penghasilan pada periode mendatang yang kecil sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Penyajian aset pajak tangguhan harus terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca.

Diberlakukannya PSAK 46 mensyaratkan *agent* mengakui dan menilai kembali aset pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aset pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menghindari penurunan laba.

6. Manajemen Laba

a. Pengertian Manajemen Laba

Agent memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif dalam mencatat transaksi sekaligus memilih opsi-opsi yang ada dalam perlakuan akuntansi. Fleksibilitas ini digunakan oleh *agent* untuk mengelola laba perusahaan. Perilaku *agent* yang mendasari lahirnya manajemen laba adalah perilaku *opportunistic manager* dan *efficient contracting*. Sebagai perilaku oportunistik, *agent* memaksimalkan

utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi dan hutang serta *political cost* (Scott, 2000). Perilaku oportunistik ini direfleksikan dengan melakukan rekayasa keuangan dengan menerapkan *income increasing discretionary accrual* atau *income decreasing discretionary accrual*. Sedangkan sebagai *efficient contracting* yaitu meningkatkan keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi privat.

Perilaku manajemen oportunistik dikenal dengan istilah manajemen laba. Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi agar menyesatkan *principal* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu (Healy dan Wahlen, 1998 dalam Sulistyanto, 2014). Schipper (2000) dalam Sumomba (2010) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi *agent* yang dengan sengaja menentukan laba sesuai keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Definisi menurut Yulianti (2004), manajemen laba dalam arti sempit didefinisikan perilaku *agent* “bermain” dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya laba. Sedangkan dalam arti luas manajemen laba didefinisikan tindakan *agent* untuk meningkatkan dan mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan probabilitas ekonomis jangka panjang.

Definisi tersebut memiliki benang merah yang menghubungkan definisi yang satu dengan yang lainnya, yaitu menyepakati bahwa manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi laporan keuangan baik dengan cara mengelola data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi umum, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan (Sulistyanto, 2014).

b. Jenis Manajemen Laba

Scott (2006:365) membagi praktek manajemen laba yang biasa dilakukan manajemen menjadi empat jenis:

- 1) *Taking big bath*, yaitu manajemen mencoba mengalihkan *expected future cost* ke periode kini agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa datang. Biasanya dilakukan bila perusahaan mengadakan restrukturisasi atau reorganisasi.
- 2) *Income minimization*, yaitu manajemen mencoba memindahkan beban ke masa kini agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa mendatang.
- 3) *Income maximization*, yaitu manajemen mencoba meningkatkan laba masa kini dengan memindahkan beban ke masa mendatang. Biasanya dilakukan manajer dalam rangka memperoleh bonus tahunan.
- 4) *Income smoothing*, yaitu tindakan di mana manajemen memperhalus fluktuasi laba dari periode ke periode dengan cara

memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah.

c. Motivasi Manajemen Laba

Tiga motivasi yang dapat menjelaskan alasan manajer melakukan upaya manajemen laba menurut Sulistyanto (2014:65) :

1) Motivasi Pasar Modal

Saat ini dunia usaha lebih menyukai menggunakan dana yang diperoleh dari pasar modal. Sementara di sisi lain publik juga mulai mengalami perubahan orientasi dalam menyimpan dana.

Publik saat ini lebih menyukai pasar modal untuk menginvestasikan dana daripada menggunakan perbankan.

Teori manajemen modern menjelaskan pentingnya pemisahan dan kepemilikan perusahaan dengan tujuan agar perusahaan dikelola secara profesional oleh orang yang memahami bagaimana menjalankan sebuah perusahaan dengan baik. Sehingga dalam Teori ini pemilik cukup menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelola perusahaannya. Meski demikian, pemegang saham mayoritas tetap akan mempunyai hak suara lebih besar dibandingkan pemegang saham yang lain. Namun, pemisahan ini mendorong *agent* berperilaku oportunistik yaitu mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan pihak lain. Laporan keuangan yang seharusnya menginformasikan nilai dan kondisi fundamental perusahaan digunakan untuk kepentingan

pribadi. Hal ini dilakukan dengan menyembunyikan, menunda pengungkapan, atau mengubah informasi fundamental menjadi informasi palsu pada saat perusahaan akan melakukan suatu transaksi.

2) Penawaran Saham Perdana

Penawaran saham perdana atau *initial public offerings* (IPO) merupakan penawaran saham suatu perusahaan *private* untuk pertama kalinya kepada publik. Perusahaan *private* sering disebut perusahaan keluarga atau perusahaan tertutup. Hal ini yang membuat pemilik mempunyai hak dan tanggung jawab yang tidak terbatas dalam perusahaan. Tujuan perusahaan melakukan penawaran adalah untuk memperoleh tambahan dana dan membagi-bagikan risiko perusahaan. Perusahaan cenderung menginformasikan hal-hal yang positif agar investor juga merespon saham yang ditawarkan. *Agent* akan menyembunyikan, menunda, atau mengubah informasi yang dapat membuat investor mempunyai persepsi negatif terhadap perusahaan sebab hal tersebut akan mengakibatkan harga saham perusahaan jatuh. Perusahaan melaporkan labanya lebih tinggi dibandingkan laba sesungguhnya ketika penawaran. Inilah sebabnya manajer melakukan manajemen laba saat penawaran saham perdana.

3) Motivasi Kontraktual

Motivasi kontrak muncul karena perjanjian antara *agent* dengan pihak lain yang berbasis pada kompensasi manajerial dan perjanjian utang.

4) Motivasi Regulasi

Hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan pemerintah merupakan pemicu terjadi permasalahan agensi antara kedua belah pihak apabila ada pihak yang tidak menjalankan kewajibannya. Perusahaan berkewajiban membayar pajak. Dengan menggunakan laba sebagai dasar perhitungan pajak, semakin besar laba yang diperoleh semakin besar pajak yang harus dibayar. Manajer akan berusaha agar laba perusahaan terlihat lebih rendah daripada laba yang sesungguhnya diperoleh. Alasan lain manajer mempunyai motivasi regulasi untuk melakukan pelanggaran regulasi pemerintah contohnya melanggar anti monopoli.

d. Metode Manajemen Laba

Menurut Sulistiyanto (2008) ada empat metode untuk melakukan manajemen laba yaitu:

1) Pemilihan Metode Akuntansi (*Accounting Method Choice*)

Ada berbagai metode akuntansi yang selama ini diakui oleh prinsip akuntansi, misalkan metode depresiasi garis lurus, saldo menurun, atau jumlah angka tahun untuk mengalokasikan harga perolehan (*cost*) aset tetap. Metode FIFO, LIFO atau average untuk menentukan harga pokok persediaan. Prinsip akuntansi

juga memberi kebebasan kepada penggunanya untuk memilih metode dan prosedur akuntansi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

2) Penerapan Metode Akuntansi (*Accounting Method Application*)

Setelah memilih metode akuntansi dan menentukan nilai estimasi akuntansi sesuai dengan kepentingannya, manajer membuat kebijakan bagaimana cara menerapkan tanpa harus melanggar prinsip akuntansi. Upaya untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi sesuai dengan kepentingan manajer, bisa dilakukan untuk mengelola dan mengatur labanya agar lebih tinggi atau rendah dari laba yang sesungguhnya.

3) Waktu Menerapkan Metode Akuntansi (*Accounting Method Timing*)

Selain mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan metode atau standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan, manajer juga mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan kapan dan bagaimana suatu transaksi / peristiwa diakui sebagai transaksi dan peristiwa akuntansi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Artinya, suatu transaksi atau peristiwa tidak harus dilaporkan pada periode terjadinya, namun dilaporkan dan diungkapkan sesuai dengan kebijakan dan kepentingan perusahaan.

4) Pemilihan Waktu (*Timing*)

Pemilihan waktu akuisisi aset dan disposisi dapat mempengaruhi laba akuntansi. Pengusaha dapat menggunakan metode ini ketika seberapa besar yang diinvestasikan dalam biaya pemeliharaan, yang diakui sebagai biaya periodik pada periode terjadinya pengeluaran. Pengusaha dapat memutuskan saat yang tepat rencana penjualan, *property*, dan *equipment* untuk dipercepat atau ditunda pengakuan keuntungan atau kerugian.

7. Perencanaan Pajak

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah tahap dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2016:7). Menurut Pohan (2011:9), menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Hal ini ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Sedangkan menurut Zain (2007:67) perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang dilakukan agar beban pajak turun. Dari ketiga definisi di atas dapat

disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

b. Tahapan Dalam Perencanaan Pajak

Adapun tahap-tahap dalam membuat perencanaan pajak menurut Suandy (2016:15) adalah sebagai berikut:

1) Menganalisis Informasi yang Ada

Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang efisien. Sangat penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi.

2) Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya Pajak

Model yang akan digunakan untuk perencanaan pajak dibutuhkan untuk dapat melaksanakan rencana pajak dengan baik, terstruktur, dan rapi. Model yang dibuat harus sesuai dengan tujuan perencanaan pajak suatu perusahaan.

3) Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

4) Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan terbaik atas perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan atau perundang-undangan. Jadi akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

5) Memutakhirkan Rencana Pajak

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis.

Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini.

c. Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2011:11) tujuan perencanaan pajak, yaitu :

- 1) Meminimalisir beban pajak yang terutang
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak
- 3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku

Perusahaan yang akan melakukan perencanaan pajak juga harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Faktor penyebab suatu perusahaan harus memiliki tujuan (Suandy, 2016:4), yaitu:

- 1) Membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Dengan menetapkan tujuan maka perusahaan akan menarik orang-orang sehingga mau bekerja untuk perusahaan.
- 2) Membantu mengkoordinasikan keputusan dalam pengambilan keputusan. Tujuannya agar dapat mengurangi pertentangan dalam pengambilan keputusan oleh semua karyawan.
- 3) Menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Tujuan merupakan norma terakhir untuk organisasi dalam menilai dirinya, tanpa tujuan organisasi tidak mempunyai dasar yang jelas untuk menilai keberhasilan.

4) Merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi.

d. Strategi dalam Perencanaan Pajak

Beberapa strategi yang digunakan dalam mengefisienkan beban pajak yang harus dibayar menurut Silitonga (2013) adalah :

1) Tax Saving

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya perusahaan dapat melakukan perubahan dan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

2) Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak. Misalnya perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21.

3) Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi dengan menguasai peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi dapat berupa :

- a) Sanksi administratif, yaitu denda, bunga, atau kenaikan
- b) Sanksi pidana, yaitu pidana atau kurungan.

4) Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

5) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Pembayaran pajak yang dapat dikreditkan merupakan pajak dibayar dimuka, antara lain Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor, Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib pajak –terutama badan, dalam usahanya melaksanakan perencanaan pajak dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Diantara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun ilegal.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Basis Akrual terhadap Perencanaan Pajak

Basis akrual berarti transaksi dan peristiwa keuangan diakui pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Transaksi basis akrual juga dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Pencatatan dengan basis akrual menghasilkan laba yang lebih akurat karena transaksi diakui di awal. Selain itu, dalam peraturan perpajakan

dianjurkan menggunakan basis akrual. Namun, pengakuan di awal menyebabkan *agent* dapat mengatur besar kecilnya laba sebelum pajak dengan mempercepat pengakuan biaya untuk membuat pajak rendah. Hal tersebut dikarenakan tidak perlu ada bukti transaksi fisik pada pengakuan basis akrual. Maka dari itu, basis akrual diindikasikan dapat digunakan untuk sebagai alat melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dalam hal ini bertujuan untuk menghasilkan pajak yang rendah.

Perencanaan pajak untuk menghasilkan pengeluaran pajak yang rendah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan hati-hati. Teori yang mendukung hipotesis ini adalah poin tiga pada Teori Akuntansi Positif yaitu *The Political Cost Hypothesis* yang berarti perusahaan berusaha untuk menghindari biaya politik yang besar. Biaya politik dalam penelitian ini berupa pajak beserta sanksinya. Oleh karena itu, semakin besar biaya politik, *agent* cenderung menggunakan metode akuntansi untuk menekan pajak yang terutang dengan menurunkan laba sebelum pajak berdasarkan metode akuntansi yang legal. Namun, apabila *agent* diketahui dengan sengaja menghindari biaya politik, maka di masa depan utang pajak akan bertambah melalui koreksi fiskal dan sanksi pun akan semakin besar. Maka dapat diduga *The Political Cost Hypothesis* akan semakin besar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syanthi *et al.*, (2012) mengungkapkan bahwa basis akrual tidak terbukti terjadi dalam melakukan perencanaan pajak. Hal tersebut dikarenakan tahun penelitian yang diambil bersamaan dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan. Sehingga

basis akrual tidak berkontribusi pada praktek perencanaan pajak akibat penurunan tarif pajak. Berbeda dengan penelitian Yona (2018) yang menyatakan bahwa basis akrual memiliki pengaruh positif dalam praktik perencanaan pajak karena basis akrual masih dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat perencanaan pajak dengan mempercepat pengakuan biaya untuk menekan pajak yang terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka dapat diindikasikan terdapat pengaruh langsung basis akrual yang digunakan sebagai indikator adanya perencanaan pajak.

H1 : Basis akrual berpengaruh terhadap perencanaan pajak

2. Pengaruh Basis Akrual terhadap Manajemen Laba

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual menurut PSAK No.1 yang berlaku. Kebijakan akuntansi di Indonesia menghendaki agar perusahaan menggunakan basis akrual karena perhitungan pendapatan dan beban dilakukan tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Penyusunan laporan keuangan yang menggunakan basis akrual digunakan oleh *agent* untuk mengelola laba sehingga dapat mempengaruhi keputusan *principal*. Basis akrual dapat dimanfaatkan untuk merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan, sehingga dengan manajemen laba yang dilakukan akan dihasilkan angka laba sesuai keinginan. Pengelolaan laba agar diperoleh laba bersih yang tinggi dilakukan dengan cara mengatur besar kecilnya laba dengan mempercepat pengakuan penghasilan untuk memperbesar laba bersih karena basis akrual tidak memerlukan adanya bukti transaksi fisik.

Pada tahap manajemen laba, *agent* fleksibel untuk menentukan alternatif dalam mencatat transaksi agar dapat diseleksi tindakan dalam menghasilkan laba yang paling sesuai. Manajemen laba disini bertujuan untuk memaksimalkan laba bersihnya. Basis akrual diindikasikan dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan manajemen laba oleh *agent*.

Agent memiliki informasi lebih banyak daripada pemegang saham. Dengan kebijakan akuntansi yang diharuskan menggunakan basis akrual, maka manajemen dapat memanfaatkan untuk mengatur laba tanpa sepengetahuan pemegang saham. Hal ini dilakukan agar *agent* memperoleh bonus apabila laba tinggi dari periode ke periode. Kepentingan pribadi *agent* diduga dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi yang diterima *principal*. Sesuai dengan asumsi tentang informasi atau *asymmetric information* pada Teori Agensi yang menekankan adanya ketidakseimbangan informasi yang diterima *principal* dan *agent*. Manajemen tidak menyajikan keseluruhan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh *principal*. Dengan diindikasikan terdapatnya praktek manajemen laba, berarti manajemen tidak melaporkan hasil sesuai dengan kenyataan, tetapi mereka akan membuat laporan keuangan yang lebih baik tetapi tidak sesuai.

Penelitian Sumbari dkk., (2017) menyatakan bahwa basis akrual mempunyai pengaruh positif untuk mengukur manajemen laba karena basis akrual tidak membutuhkan bukti kas secara fisik sehingga *agent* dapat dengan leluasa mengelola pendapatan dan beban sesuai keinginan. Berbeda dengan Suranggane (2007) yang menyatakan bahwa basis akrual memiliki pengaruh

terhadap terjadinya manajemen laba untuk mendeteksi tingkat manajemen laba di sebuah perusahaan untuk menghindari melaporkan kerugian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka dapat diindikasikan adanya pengaruh langsung basis akrual yang dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba.

H2 : Basis akrual berpengaruh terhadap manajemen laba

3. Pengaruh Basis Akrual terhadap Manajemen Laba melalui Perencanaan Pajak

Basis akrual umumnya memberikan indikasi yang lebih baik dalam menciptakan laporan keuangan karena transaksi dan peristiwa keuangan diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar serta dicatat dalam catatan akuntansi (IAI, 2002). Menurut Pasal 28 UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga menghendaki perusahaan menerapkan metode basis akrual. Oleh sebab itu, dengan pengakuan transaksi tidak pada saat kas diterima atau dikeluarkan mengindikasikan *agent* melakukan manajemen laba karena dengan pengakuan transaksi di awal dapat digunakan untuk mengelola angka-angka dalam laporan keuangan sesuai yang diinginkan *agent* dengan cara mengatur besar kecilnya pajak dengan mempercepat pengakuan penghasilan dan biaya diakui pada periode selanjutnya karena dalam basis akrual tidak diperlukan bukti kas fisik.

Dengan tujuan agar menciptakan pajak yang minimal, maka perusahaan akan cenderung menghasilkan laba sebelum pajak yang rendah. Pajak yang

minimal dapat diperoleh dengan menyusun perencanaan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan hati-hati. Sehingga dapat digunakan untuk mengubah besar pajak yang terutang yang dihasilkan dan dapat mempengaruhi praktik manajemen laba.

Prinsip akuntansi di Indonesia menghendaki agar perusahaan menggunakan basis akrual karena pengakuan pendapatan dan beban di awal tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau belum (Jusup, 2005:174). Apabila pajak yang terutang kecil maka perusahaan akan memiliki laba bersih yang tinggi. Hal ini membuat manajemen dapat mengembangkan perusahaan kearah yang lebih baik dan untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di perusahaan.

Perusahaan dengan *Political Cost* yang besar cenderung menggunakan metode akuntansi untuk menurunkan laba sebelum pajak sehingga pajak yang terutang dapat ditekan dan sanksi pajak tidak bertambah. Hal ini sesuai dengan *The Political Cost Hypothesis*. Dengan pajak yang kecil juga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Namun, dengan perusahaan diketahui menghindari biaya politik dengan sengaja, maka sanksi akan semakin besar karena utang pajak akan bertambah.

Kepentingan pribadi *agent* untuk memperoleh bonus apabila laba bersih tinggi diduga dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi yang diterima *principal*. Teori yang mendukung yaitu asumsi tentang informasi atau *asymmetric information* pada Teori Agensi yang menekankan adanya

ketidakseimbangan informasi yang diterima *principal* dan *agent*. Dalam hal ini manajemen tidak menyajikan keseluruhan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh *principal*. Dengan diindikasikan terdapatnya praktek manajemen laba, berarti manajemen tidak melaporkan hasil sesuai dengan kenyataan, tetapi mereka akan membuat laporan keuangan yang lebih baik tetapi tidak sesuai.

Pada penelitian yang dilakukan Sumbari dkk., (2017) menyatakan bahwa basis akrual mempunyai pengaruh positif untuk mengukur manajemen laba karena basis akrual tidak membutuhkan bukti kas secara fisik sehingga *agent* dapat dengan leluasa mengelola pendapatan dan beban sesuai keinginan. Penelitian di atas tidak meneliti pengaruh tidak langsung basis akrual terhadap manajemen laba melalui perencanaan pajak. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka dapat diindikasikan adanya pengaruh tidak langsung penggunaan basis akrual yang dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba melalui praktik perencanaan pajak.

H3 : Basis akrual berpengaruh tidak langsung terhadap manajemen laba melalui perencanaan pajak

4. Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Perencanaan Pajak

Pajak tangguhan menyebabkan koreksi positif dimana beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada beban pajak menurut akuntansi fiskal dan negatif dimana beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar daripada beban pajak menurut akuntansi fiskal. Selisih positif

menimbulkan terjadinya aset pajak tangguhan. Selisih negatif menimbulkan terjadinya liabilitas pajak tangguhan.

Aset pajak tangguhan merupakan kondisi dimana beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut perpajakan. Aset pajak tangguhan menyebabkan jumlah pajak yang kecil pada periode mendatang akibat terdapat perbedaan temporer. Aset pajak tangguhan menyebabkan potensi hutang pajak di masa depan turun karena pajak yang dibayar di masa kini tinggi sehingga pajak yang dipulihkan di masa depan kecil.

Liabilitas pajak tangguhan merupakan kondisi dimana beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar dibanding beban pajak menurut perpajakan. Liabilitas pajak tangguhan menyebabkan jumlah pajak yang kecil pada periode sekarang akibat terdapat perbedaan temporer. Liabilitas pajak tangguhan menyebabkan potensi hutang pajak di masa depan tinggi karena pajak yang dibayar di masa kini rendah.

Besarnya kecilnya pajak tangguhan yang disajikan di neraca diindikasikan berkaitan dengan praktik perencanaan pajak yang dilakukan *agent*. Pajak tangguhan diperoleh dari mengatur penghasilan dan biaya sesuai keinginan *agent*. Apabila *agent* ingin memiliki aset pajak tangguhan di masa depan, maka pajak yang dibayar sekarang harus lebih besar dengan mengelola penghasilan pada masa kini harus lebih besar daripada biaya. Sementara itu, liabilitas pajak tangguhan di masa kini diperoleh dari penghasilan yang kecil sehingga pajak akan lebih kecil di masa kini. Hal itulah yang akan

memberikan celah untuk manajemen melakukan perencanaan pajak. Maka manajemen akan membuat pilihan untuk memanfaatkan aset pajak tangguhan ataupun liabilitas pajak tangguhan sesuai laba rugi fiskal yang dimiliki yang akan mempengaruhi pajak yang terutang perusahaan.

Teori Akuntansi Positif yang mendukung yaitu *The Political Cost Hypothesis*. *The Political Cost Hypothesis* merupakan kondisi dimana perusahaan berusaha untuk menghindari biaya politik yang besar. Biaya politik dalam penelitian ini berupa pajak beserta sanksinya. Perusahaan diduga menekan pajak yang terutang dengan mengelola besar kecilnya pajak tangguhan agar biaya politik rendah. PSAK 46 yang mengatur tentang aset dan liabilitas pajak tangguhan mengungkapkan bahwa pajak tangguhan dapat diakui. Pajak tangguhan diperoleh dari pengakuan penghasilan dan biaya akrual. Besar kecilnya pengakuan penghasilan akan mempengaruhi laba fiskal. Namun, apabila perusahaan diketahui dengan sengaja menghindari biaya politik, maka utang pajak dan sanksi pun akan semakin besar. Maka dapat diduga *Political Cost* akan semakin besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Astutik (2016) menggunakan perencanaan pajak dan pajak tangguhan sebagai variabel independen terhadap manajemen laba. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Aditama (2014) yang menjadikan perencanaan pajak sebagai variabel independen terhadap manajemen laba. Berbeda dengan penelitian ini, perencanaan pajak digolongkan sebagai variabel *intervening* dan menguji apakah terdapat pengaruh antara pajak tangguhan terhadap perencanaan pajak. Mengacu pada

pernyataan tersebut, maka dapat diindikasikan adanya pengaruh pajak tangguhan yang dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba.

H4 : Pajak tangguhan berpengaruh terhadap perencanaan pajak

5. Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Pajak tangguhan adalah pajak yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak) (Phillips *et al.*, 2003). Pajak tangguhan menyebabkan koreksi fiskal positif dimana beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada beban pajak menurut akuntansi fiskal dan koreksi fiskal negatif dimana beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar daripada beban pajak menurut akuntansi fiskal.

Aset pajak tangguhan terjadi apabila beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut perpajakan. Aset pajak tangguhan menyebabkan jumlah pajak yang kecil pada periode mendatang akibat terdapat perbedaan temporer. Aset pajak tangguhan dapat dipilih untuk mendapatkan laba bersih yang tinggi di masa depan.

Liabilitas pajak tangguhan terjadi apabila beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar dibanding beban pajak menurut perpajakan. Liabilitas pajak tangguhan menyebabkan jumlah pajak yang besar pada periode mendatang akibat terdapat perbedaan temporer. Liabilitas pajak tangguhan dipilih untuk mendapatkan laba bersih yang tinggi pada periode sekarang. Semakin besarnya motivasi *agent* untuk mengatur laba sesuai keinginan dan

kebutuhan perusahaan akan berpengaruh pada besarnya pajak tangguhan suatu perusahaan. Hal ini menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan harus berhati-hati dalam menggunakan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Pajak tangguhan diindikasikan dapat dijadikan alat untuk melakukan manajemen laba dalam perusahaan dikarenakan besarnya pajak tangguhan disajikan sesuai keinginan *agent* dan kondisi perusahaan. Sesuai dengan PSAK 46 yang memperbolehkan perusahaan mengakui pajak tangguhan, *agent* dapat dengan bebas memilih metode akuntansi guna menilai pengakuan pajak tangguhan. Apabila *agent* ingin memiliki laba bersih yang tinggi di masa depan maka menciptakan aset pajak tangguhan. Sebaliknya, apabila manajemen menghendaki laba bersih yang tinggi di masa kini maka dapat memanfaatkan liabilitas pajak tangguhan. Hal tersebut akan memberikan celah untuk *agent* melakukan manajemen laba.

Agent memiliki informasi lebih banyak daripada pemegang saham. *Agent* yang lebih mengerti kondisi perusahaan. Dengan kebijakan akuntansi PSAK 46 dan perpajakan yang memperbolehkan perusahaan mengakui pajak tangguhan, maka *agent* dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk mengatur pajak tangguhan tanpa sepengetahuan pemegang saham. Pajak tangguhan diperoleh dari pengakuan pendapatan dan beban akrual akibat perbedaan temporer. Besar kecilnya pengakuan pendapatan dan beban akan mempengaruhi laba sebelum pajak. Hal ini dilakukan agar *agent* memperoleh bonus apabila laba tinggi dari periode ke periode. Kepentingan pribadi *agent*

diduga dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi yang diterima *principal*. Teori yang mendukung yaitu asumsi tentang informasi atau *asymmetric information* pada Teori Agensi yang menekankan adanya ketidakseimbangan informasi yang diterima *principal* dan *agent*. Dalam hal ini manajemen tidak menyajikan keseluruhan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh *principal*. Dengan diindikasikan terdapatnya praktek manajemen laba, berarti manajemen tidak melaporkan hasil sesuai dengan kenyataan, tetapi mereka akan membuat laporan keuangan yang lebih baik tetapi tidak sesuai. Hal ini membuat manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan menghasilkan laba bersih yang besar.

Sesuai penelitian Phillips et al., (2003) mendapati bahwa terdapat pengaruh pada variabel pajak tangguhan terhadap manajemen laba karena pajak tangguhan masih dapat melengkapi langkah untuk mendeteksi tingkat manajemen laba di sebuah perusahaan untuk menghindari melaporkan kerugian yang dilakukan di Amerika. Suranggane (2007) mengungkapkan bahwa aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena rentang waktu 2003-2005 kebijakan PSAK 46 masih tergolong baru di Indonesia yaitu berlaku tahun 2001. Sehingga, perusahaan belum memanfaatkan celah yang ada. Bertolak belakang dengan penelitian Hakim (2015) berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada Perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia karena karakteristik bank perbankan apabila laba stabil maka akan semakin tinggi kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang.

Mengacu pada pernyataan tersebut, maka dapat diindikasikan adanya pengaruh pajak tangguhan yang dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba.

H5 : Pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba

6. Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba melalui Perencanaan Pajak

Selisih positif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi positif yang menimbulkan terjadinya aset pajak tangguhan. Selisih negatif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi negatif yang menimbulkan terjadinya liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak yang besar akan menurunkan tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan, begitu pula beban pajak yang kecil akan menaikkan tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

Aset pajak tangguhan merupakan kondisi dimana beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut perpajakan. Aset pajak tangguhan menyebabkan jumlah pajak yang kecil pada periode mendatang akibat terdapat perbedaan temporer. Aset pajak tangguhan dipilih untuk mendapatkan laba bersih tinggi pada periode yang akan datang.

Liabilitas pajak tangguhan merupakan kondisi beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar dibanding beban pajak menurut perpajakan. Liabilitas pajak tangguhan menyebabkan jumlah pajak yang kecil masa sekarang akibat ada perbedaan temporer. Liabilitas pajak tangguhan dapat dipilih untuk mendapatkan laba yang tinggi pada periode masa sekarang.

Besar kecilnya pajak tangguhan diindikasikan berkaitan dengan praktik manajemen laba melalui perencanaan pajak karena akan mempengaruhi pajak dan laba yang akan diperoleh perusahaan.

Dengan tujuan agar menghasilkan laba yang tinggi, maka perusahaan akan cenderung menghasilkan pajak yang rendah. Pajak yang minimal dapat diperoleh dengan menyusun perencanaan pajak yang sesuai peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak untuk menghasilkan pengeluaran pajak yang kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan hati-hati.

Perusahaan diduga menghindari biaya politik yang besar. Biaya politik dalam penelitian ini berupa pajak beserta sanksinya. Perusahaan berusaha menekan pajak yang terutang dengan mengelola laba melalui besar kecilnya pajak tangguhan karena pajak tangguhan juga diatur dalam PSAK 46. PSAK 46 mengatakan bahwa pajak tangguhan yang terdiri dari aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dapat diakui. Pajak tangguhan diperoleh dari pengakuan penghasilan dan biaya akrual.

Besar kecilnya pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diindikasikan akan mempengaruhi laba bersih. Teori Akuntansi Positif yang mendukung yaitu *Political Cost Hypothesis*. Dengan perusahaan meminimalkan pajak, maka biaya politik akan turun sehingga laba bersih yang diperoleh perusahaan akan tinggi. Hal ini dilakukan agar *agent* memperoleh bonus apabila laba tinggi dari periode ke periode. Namun, apabila *agent* diketahui dengan sengaja menghindari biaya politik, maka

utang pajak dan sanksi pun akan semakin besar di masa mendatang. Dapat diduga *Political Cost* juga akan semakin besar.

Pajak tangguhan dapat mengindikasikan praktik manajemen laba sebuah perusahaan. Hal ini didukung penelitian dari Budiman (2012) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan dalam praktik manajemen laba. Sementara itu, aset pajak tangguhan tidak mempunyai pengaruh pada manajemen laba karena selama rentang waktu penelitian terdapat perubahan tarif pajak penghasilan untuk badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Perwita *et al.*, (2014) yang mengungkapkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba tetapi aset pajak tangguhan tidak berpengaruh karena masih ada faktor yang lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba yang dapat melengkapi langkah untuk mendeteksi tingkat manajemen laba yang tidak dijelaskan di penelitian tersebut di sebuah perusahaan untuk menghindari melaporkan kerugian. Kedua penelitian diatas tidak meneliti pengaruh tidak langsung basis akrual terhadap manajemen laba melalui perencanaan pajak. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka dapat diindikasikan adanya pengaruh tidak langsung pajak tangguhan yang dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba melalui praktik perencanaan pajak.

H6 : Pajak tangguhan berpengaruh tidak langsung terhadap manajemen laba melalui perencanaan pajak

D. Model Konsep dan Model Hipotesis

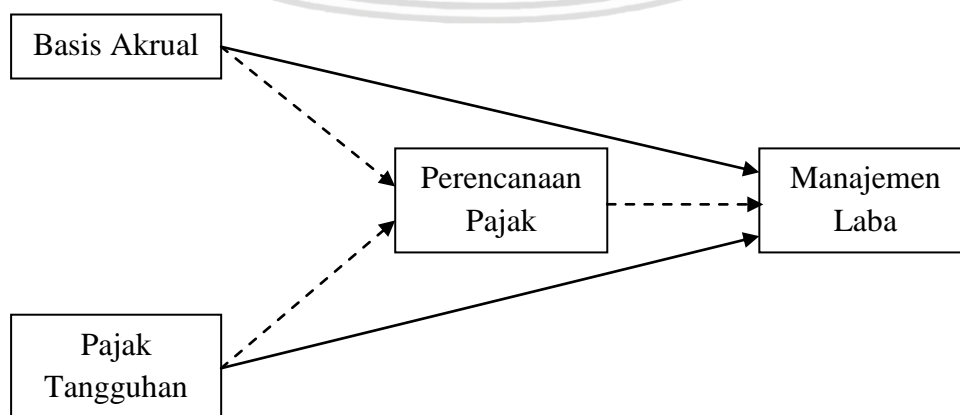
1. Model Konsep

Model konsep dalam penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh penggunaan basis akrual dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba dengan perencanaan pajak sebagai variabel *intervening* dengan menggunakan Teori Agensi. Teori Agensi merupakan Teori yang menjelaskan hubungan agensi berupa pendelegasian wewenang atau pekerjaan dari *principal* kepada *agent* selaku pihak yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan menggunakan asumsi sebuah kontrak (Jensen dan Meckling, 1976). Teori Agensi mencoba untuk menyelesaikan masalah agensi antara *principal* yang berkepentingan terhadap modal yang ditanamkan, *agent* yang berkepentingan terhadap bonus yang akan diperolehnya, dan juga pemerintah berkepentingan terhadap pajak yang akan dikenakan pada perusahaan. Masalah yang timbul dikarenakan sering terjadi perbedaan tujuan dan kepentingan antar masing-masing pihak.

Agent sebagai pihak yang mengelola perusahaan secara langsung cenderung lebih mengetahui informasi-informasi penting dalam sebuah perusahaan. Sehingga dalam Teori Agensi diindikasikan *agent* melakukan tindakan yang memberikan keuntungan pribadi dan memanfaatkan *asymmetric information*. *Agent* memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan manajemen laba pada perusahaannya untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan.

Perencanaan pajak diindikasikan dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan manajemen laba. *Agent* melakukan perencanaan pajak agar beban pajak perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin. Hasilnya dapat membuat laba bersih yang besar yang akan menguntungkan perusahaan.

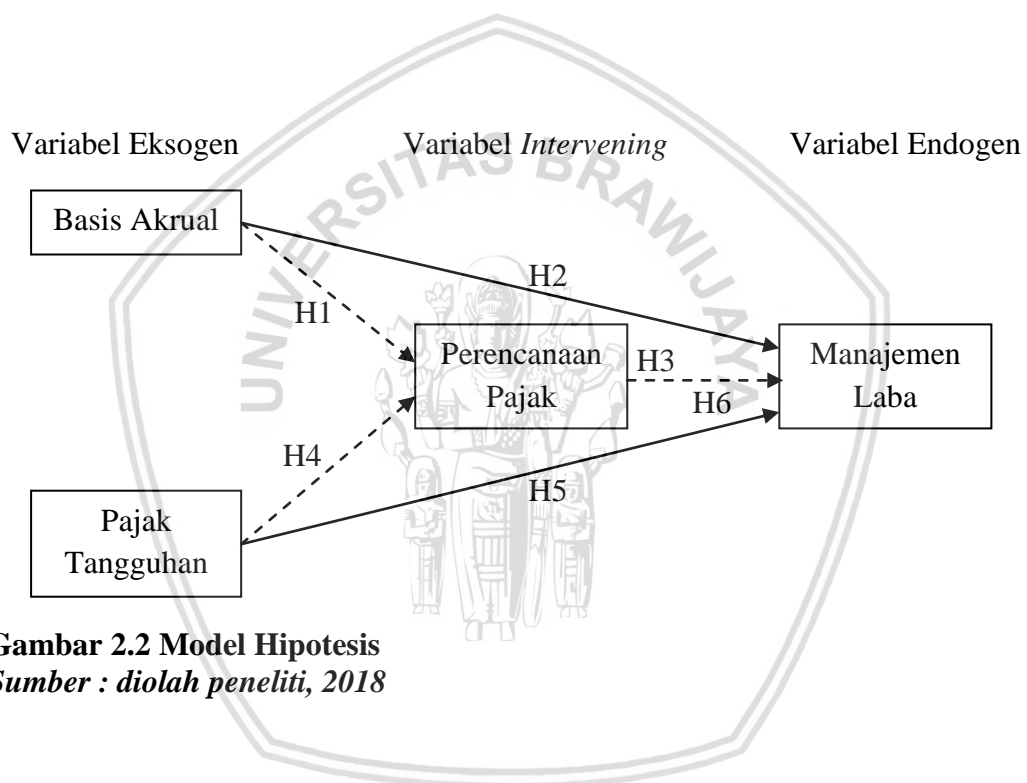
Penggunaan basis akrual dapat digunakan sebagai alat melakukan perencanaan pajak melalui manajemen laba. Instrumen pajak tangguhan juga dapat dijadikan alat melakukan perencanaan pajak melalui manajemen laba karena dengan terbitnya PSAK Nomor 46, perusahaan menghitung dan mengakui besarnya beban pajak penghasilan untuk tahun berjalan dengan menghitung dan mengakui pajak tangguhan. Pajak tangguhan terbagi menjadi dua proksi yaitu aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan dapat digunakan untuk merekayasa laba yang berpengaruh dimana dapat membuat laba bersih masa mendatang besar. Liabilitas pajak tangguhan dapat digunakan untuk merekayasa laba dimana dapat membuat laba bersih masa kini besar. Model konsep sesuai dengan penjelasan diatas digambarkan seperti di bawah ini :



Gambar 2.1 Model Konsep
Sumber : diolah peneliti, 2018

2. Model Hipotesis

Hipotesis sebagai jawaban sementara peneliti terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis didasarkan pada rumusan masalah dan penjelasan pada latar belakang dan tinjauan pustaka (Sugiyono, 2014:16). Hipotesis tentang penelitian ini digambarkan dengan gambar sebagai berikut :



Gambar 2.2 Model Hipotesis
Sumber : diolah peneliti, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan analisis eksplanatori (*explanatory research*). *Explanatory research* adalah penelitian yang mencoba untuk menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2014:13). Alasan pemilihan jenis penelitian ini adalah karena tujuannya untuk menganalisis pengaruh penggunaan basis akrual dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba dengan perencanaan pajak sebagai variabel *intervening*.

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2015:8). Penggunaan pendekatan kuantitatif disebabkan terdapat pengujian dan analisis statistik mengenai penggunaan basis akrual dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba dengan perencanaan pajak sebagai variabel *intervening*.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel eksogen (variabel bebas), variabel endogen (variabel terikat), dan variabel *intervening*. Variabel

penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:38). Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Variabel eksogen

Variabel eksogen atau bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel endogen (terikat) (Creswell, 2014 : 77). Pengaruh variabel eksogen dapat bersifat positif dan negatif. Pengaruh variabel eksogen bersifat positif pada saat variabel eksogen mengalami peningkatan yang diikuti dengan peningkatan variabel endogen. Pengaruh variabel eksogen bersifat negatif pada saat variabel eksogen mengalami penurunan yang diikuti dengan penurunan variabel endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah basis akrual (AKRU) dan pajak tangguhan (DEFERRED).

b. Variabel endogen

Variabel endogen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel eksogen (bebas) (Creswell, 2014 : 77). Variabel ini merupakan nilai-nilai dari objek penelitian yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah manajemen laba (EARNING).

c. Variabel *Intervening*

Variabel *intervening* adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel eksogen dengan endogen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur (Sugiyono, 2015 : 39). Variabel

intervening hanya dapat disimpulkan (Neolaka, 2014 : 63). Variabel *intervening* yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak (TAXPLAN).

2. Definisi Operasional Variabel

a. Basis Akrua (AKRU)

Basis akrual mengakui penghasilan dan biaya dalam arti pada waktu kejadian bukan saat diterima atau dikeluarkan. Dalam PSAK 1 dijelaskan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual. Skala pengukuran yang digunakan adalah rasio karena data yang digunakan memiliki nilai nol mutlak dan dapat dikalikan atau dibagi. Variabel basis akrual dalam penelitian ini akan diproksi dengan *discretionary accrual* dari *Modified Jones Model* yang merupakan model terbaik untuk mendeteksi penggunaan basis akrual (Phillips *et al.*, 2003). Basis akrual ini diperoleh dari formula :

$$TAcc\ it = \frac{EBEI\ it - (CFO\ it - EIDO\ it)}{total\ aset\ t - 1}$$

Keterangan :

- $TAcc\ it$: Total akrual perusahaan pada periode t
- $EBEI\ it$: Pendapatan sebelum pos-pos luar biasa perusahaan pada periode t
- $CFO\ it$: Arus kas operasi perusahaan pada periode t
- $EIDO\ it$: Pos-pos luar biasa dan arus kas dari penghentian operasi perusahaan pada periode t
- $total\ aset\ t - 1$: Total aset pada periode t-1

b. Pajak Tangguhan (DEFERRED)

Pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer atau beda waktu pengakuan secara akuntansi komersial dengan fiskal. Pajak tangguhan terbagi menjadi rekonsiliasi fiskal berupa koreksi positif dimana

pendapatan menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal dan negatif dimana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiskal (Agoes dan Trisnawati, 2007). Skala pengukuran yang digunakan adalah rasio karena data yang digunakan memiliki nilai nol mutlak dan dapat dikalikan atau dibagi. Penghitungan pajak tangguhan dibagi dengan total aset karena menurut Phillips *et al.*, (2003) dan Blouin *et al.*, (2010) besar pajak tangguhan bergantung pada total aset pada periode yang lalu untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proporsional. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini pernah digunakan dalam Suranggane (2007). Pajak tangguhan ini diperoleh dari formula :

$$DEFERREDTAX_{it} = \frac{\text{pajak tangguhan } t}{\text{total aset } t - 1}$$

Keterangan :

- *pajak tangguhan t* : nilai pajak tangguhan pada akhir periode t
- *total aset t - 1* : total aset pada periode t-1

c. Perencanaan Pajak (TAXPLAN)

Perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Skala pengukuran yang digunakan adalah rasio karena data yang digunakan memiliki nilai nol mutlak dan dapat

dikalikan atau dibagi. Pengukuran perencanaan pajak menggunakan rumus laba bersih perusahaan pada periode t dibagi dengan laba sebelum pajak pada periode t karena dapat mengukur efektivitas perencanaan pajak pada laporan keuangan tahun berjalan (Wild et al, 2005). Formula perencanaan pajak ini digunakan dalam Aditama dan Purwaningsih (2014). Perencanaan pajak diperoleh dari formula :

$$TRR = \frac{Net\ Income\ it}{Pretax\ Income\ (EBIT)it}$$

Keterangan :

- *TRR* : Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak)
- *Net Income it* : Laba bersih perusahaan
- *Pretax Income (EBIT)it* : Laba sebelum pajak perusahaan

d. Manajemen Laba (EARNING)

Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan mengelola transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan *principal* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan. Salah satu tujuan manajemen laba adalah memperoleh laba bersih yang tinggi sehingga kinerja perusahaan terlihat baik. Skala pengukuran yang digunakan adalah rasio karena data yang digunakan memiliki nilai nol mutlak dan dapat dikalikan atau dibagi. Dalam penelitian ini manajemen laba dihitung dengan membagi laba bersih dengan nilai pasar ekuitas karena dengan mengetahui nilai pasar ekuitas maka akan diketahui pula saham beredar sebuah perusahaan dan menunjukkan harapan perusahaan melaporkan labanya dan menurut Chen *et al.*, (2007) manajemen laba

dapat diukur dari tingkat laba bersih. Apabila laba bersih lebih besar dari nilai pasar ekuitas awal tahun maka manajemen laba semakin tinggi. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan membagi laba bersih dengan nilai pasar ekuitas awal tahun. Ukuran manajemen laba yang dijadikan variabel dalam penelitian ini pernah digunakan oleh Ifada dan Wulandari (2015). Manajemen laba diperoleh dari formula :

$$EM = \frac{Net\ Income}{Market\ Value\ of\ Equity}$$

Keterangan :

- *Net Income* : Laba bersih
- *Market Value of Equity* : Nilai pasar ekuitas awal tahun

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Konsep	Variabel	Indikator Pengukuran	Jenis Skala
1	Pajak Tangguhan	DEFERRED	$DEFERREDTAXit = \frac{pajak\ tangguhan\ t}{total\ aset\ t - 1}$ <p>Sumber : Suranggane (2007)</p>	Rasio
2	Basis Akrua	AKRU	$TACC\ it = \frac{EBE\ it - (CFO\ it - EIDO\ it)}{total\ aset\ t - 1}$ <p>Sumber : Phillips (2003)</p>	Rasio
3	Manajemen laba	EARNING	$EM = \frac{Net\ Income}{Market\ Value\ of\ Equity}$ <p>Sumber : Ifada dan Wulandari (2015)</p>	Rasio
4	Perencanaan pajak	TAXPLAN	$TRR = \frac{Net\ Income\ it}{Pretax\ Income\ (EBIT)it}$ <p>Sumber : Aditama dan Purwaningsih (2014)</p>	Rasio

Sumber : Diolah peneliti, 2018

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2015:225). Penelitian ini menggunakan jenis data panel yang memiliki dua karakteristik data, yaitu *time series* karena data yang digunakan memiliki runtun waktu yang lebih dari satu tahun dan *cross section* karena menggunakan sampel perusahaan lebih dari satu pada tahun yang sama. Data panel dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa terdapat penurunan tingkat penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar 10% apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang diindikasikan terjadi karena adanya praktek manajemen laba pada perusahaan manufaktur.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tiga tahun mulai tahun 2014-2016. Laporan keuangan diperoleh dari *website* resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Alasan peneliti mengambil laporan keuangan karena data yang diperlukan untuk mengetahui basis akrual, pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan manajemen laba terdapat di laporan keuangan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan gabungan semua elemen yang memiliki karakteristik yang sama dan terkait dengan kepentingan penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:80). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember secara lengkap dari tahun 2014-2016 melalui website IDX yaitu www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 399 perusahaan.

Perusahaan manufaktur dipilih karena merupakan karena perusahaan-perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi lebih cenderung memilih metode akuntansi untuk mengurangi laba sebelum pajak yang dilaporkan dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil agar utang pajak rendah dan sanksi tidak bertambah (Watts dan Zimmerman (1990) dalam Jao dan Pagalung (2011). Pengambilan sampel tahun 2014-2016 juga didasari pada semakin menurunnya realisasi penerimaan pajak dari target tahun demi tahun. Hal ini disebabkan karena melemahnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan (Sari, 2015). Seperti ditunjukkan pada tabel penerimaan pajak tahun 2014-2016 berikut :

Tabel 3.2 Penerimaan Pajak Tahun 2014-2016

Tahun	Target (dalam rupiah triliun)	Realisasi (dalam rupiah triliun)	Persentase (dalam persen)
2013	1.148,4	1.071,1	93,4
2014	1.072,37	981,83	91,56
2015	1.294,26	1.060,83	81,96
2016	1.355,2	1.105,81	81,6

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016, 2018

Peneliti tidak menggunakan sampel pada tahun 2013 karena penurunan penerimaan pajak dari tahun 2013 ke 2014 tidak signifikan seperti 2014 ke 2015 yang hampir mencapai 10%. Peneliti juga tidak menggunakan tahun 2017 karena laporan keuangan perusahaan belum ter-*publish* pada saat penelitian berlangsung.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015:81). Adapun pemilihan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan sampel tersebut diantaranya adalah :

- a. Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum tahun 2014-2016 secara berturut-turut.
- b. Perusahaan yang tidak *delisting* atau dikeluarkan selama tahun 2014-2016 karena sampel diambil pada perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut.
- c. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember secara berturut-turut mulai 2014-2016 karena apabila laporan keuangan salah satu periode tidak terbit dan laporan keuangan tidak diaudit maka tidak diketahui kewajarannya dan diindikasikan mengandung kesalahan.

- d. Perusahaan manufaktur tersebut tidak mengalami kerugian selama tahun 2014-2016 dikarenakan semakin laba bersih tinggi maka diindikasikan perusahaan melakukan manajemen laba.
- e. Laporan keuangan menggunakan mata uang Indonesia Rupiah (IDR) agar tidak terjadi bias dalam penghitungan dan tidak terdapat perbedaan kurs dengan mata uang selain rupiah.
- f. Perusahaan sampel harus menerbitkan laporan keuangan yang berhubungan dengan indikator-indikator perhitungan basis akrual, pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan manajemen laba pada penelitian ini.
- g. Perusahaan yang memiliki nilai wajar dan tidak jauh berbeda dari observasi lainnya.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, perusahaan manufaktur yang termasuk dalam sampel penelitian adalah sejumlah perusahaan dengan penjabaran dalam tabel 3.3

Tabel 3.3 Kriteria Sampel Perusahaan

No	Uraian	Jumlah
A	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2016	399
B	Perusahaan manufaktur yang <i>delisting</i> periode 2014-2016	(6)
C	Perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember periode 2014-2016	(30)
D	Perusahaan mengalami kerugian antara tahun 2014-2016	(156)
E	Laporan keuangan menggunakan mata uang asing	(33)
F	Perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan yang berhubungan dengan indikator-indikator perhitungan	0
G	Perusahaan yang memiliki nilai ekstrim dan jauh	(12)

	berbeda dari observasi lainnya (<i>outlier</i>).	
	Jumlah Sampel Penelitian Periode 2014-2016	162

Sumber : diolah peneliti, 2018

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2015 : 240). Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi serta data-data yang diperlukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang relevan. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan dari tahun 2014-2016.

F. Metode Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji. Tahapan analisis data yang akan dilakukan dengan menggunakan *software* statistik SmartPLS 2.0 untuk menguji hubungan antar variabel. SmartPLS 2.0 dipilih berdasarkan pertimbangan hasil tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal dan hilang serta mampu memodelkan banyak variabel endogen dan variabel eksogen (Abdillah dan Jogiyanto, 2015:165). Selain itu, terdapat pertimbangan bahwa versi 2.0 dapat digunakan untuk sampel yang lebih dari 100 (www.smartpls.com, diakses pada 9 Mei 2018)

1. Metode *Partial Least Square* (PLS)

PLS adalah teknik statistika multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel endogen berganda dan variabel eksogen berganda (Jogiyanto, 2009:11). Pemilihan metode PLS didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian ini terdapat empat variabel laten yang dibentuk dengan indikator *formative* dan membentuk efek *intervening*. Model indikator *formative* mengasumsikan bahwa pengukuran saling terikat memengaruhi variabel latennya (Abdillah dan Jogiyanto, 2015:20). Indikator *formative* juga membentuk variabel laten.

2. Pengukuran Metode *Partial Least Square* (PLS)

PLS dalam analisis jalur terdiri atas tiga tipe hubungan menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015:187), yaitu *inner model*, *outer model*, dan *weight relation*. *Inner model* menunjukkan spesifikasi hubungan kausal antar variabel laten (model struktural). *Outer model* menunjukkan spesifikasi hubungan antara indikator atau parameter yang diestimasi dengan variabel latennya (model pengukuran). *Weight relation* menunjukkan hubungan nilai varian antar indikator dengan variabel latennya sehingga diasumsikan memiliki nilai *mean* sama dengan nol (0) dan varian sama dengan satu (1) untuk menghilangkan konstanta dalam persamaan kausalitas.

3. Tahapan Dalam Menjalankan PLS

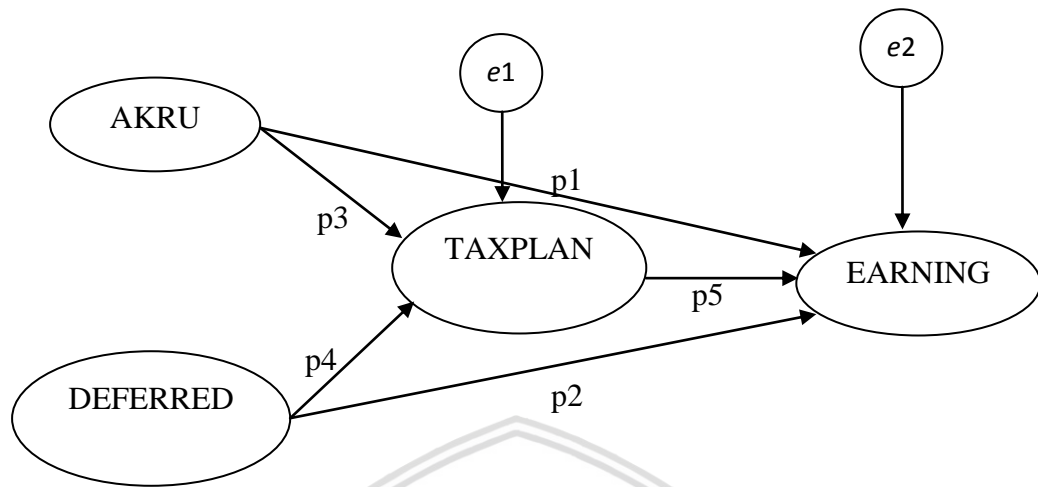
Menurut Ghazali (2015) dalam Susanti (2017), pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 5 hal, yaitu :

- a. Mendapatkan model berbasis konsep dan teori untuk merancang model struktural (hubungan antar variabel laten) dan model pengukurannya, yaitu hubungan antara indikator-indikator dengan variabel laten.
- b. Membuat diagram jalur (*diagram path*) yang menjelaskan pola hubungan antara variabel laten dengan indikatornya
- c. Konversi diagram jalur ke dalam persamaan
- d. Melakukan evaluasi *goodness of fit* untuk mengetahui kontribusi variabel eksogen terhadap variabel eksogen.
- e. Interpretasi model

4. Pengujian Hipotesis (Analisis Jalur / *Path Analysis*)

Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur untuk menguji hipotesis pengaruh antara variabel eksogen, variabel endogen, dan variabel *intervening*. Analisis jalur juga digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung ataupun tidak langsung seperangkat variabel eksogen, variabel endogen, dan variabel *intervening* (Neolaka, 2014:148). Analisis jalur dalam penelitian ini menggunakan *Sobel Test* untuk menguji ada tidaknya pengaruh secara tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel *interveningnya*. *Sobel Test* juga dipilih peneliti karena jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini cukup besar (Ghozali, 2016:243).

Rumus menghitung koefisien jalur dengan membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan :



Gambar 3.1 Model Analisis Jalur (Path Analysis)

Sumber : diolah peneliti, 2018

$$\text{TAXPLAN} = p3\text{AKRU} + p4\text{DEFERRED}$$

$$\text{EARNING} = p1\text{AKRU} + p2\text{DEFERRED} + p5\text{TAXPLAN}$$

Keterangan :

EARNING = Manajemen laba

AKRU = Basis akrual

DEFERRED = Pajak Tangguhan

TAXPLAN = Perencanaan Pajak

p1 = Koefisien jalur EARNING dengan AKRU

p2 = Koefisien jalur EARNING dengan DEFERRED

p3 = Koefisien jalur TAXPLAN dengan AKRU

p4 = Koefisien jalur TAXPLAN dengan DEFERRED

p5 = Koefisien jalur EARNING dengan TAXPLAN

e1 = Residual atas TAXPLAN

e2 = Residual atas EARNING



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di website Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel *non probability sampling* yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* dipilih berdasarkan pertimbangan pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah dipertimbangkan sebelumnya.

Kriteria tersebut antara lain seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum tahun 2014-2016 secara berturut-turut, perusahaan yang tidak *delisting* atau dikeluarkan selama tahun 2014-2016, perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember secara berturut-turut mulai 2014-2016, perusahaan manufaktur tersebut tidak mengalami kerugian selama tahun 2014-2016, laporan keuangan menggunakan mata uang Indonesia Rupiah (IDR), dan perusahaan sampel harus menerbitkan laporan keuangan yang berhubungan dengan indikator-indikator perhitungan basis akrual, pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan manajemen laba pada penelitian ini.

B. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015:147). Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan nilai *mean* (rata-rata) dan standar deviasi. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini diperoleh dari *software* SPSS 21.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AKRU	162	-0,16	0,23	-0,0068	0,06275
DEFERED	162	-0,04	0,04	0,0021	0,01379
TAXPLAN	162	0,07	1,46	0,7325	0,12936
EARNING	162	0,00	17,99	2,5346	3,86090
Valid N (listwise)	162				

Sumber: Data Peneliti SPSS 21, 2018

a. Analisis Statistik Deskriptif Untuk Variabel AKRU

Variabel AKRU yang diprosikan dengan menggunakan indikator *Total Accrual (TACC)* merupakan nilai akrual dibagi dengan total aset pada periode sebelumnya. *TACC* digunakan untuk mengukur penggunaan basis akrual suatu perusahaan. Semakin besar *TACC* mengindikasikan semakin tinggi tingkat penggunaan basis akrual. Sebanyak 174 sampel menunjukkan nilai minimum AKRU adalah -0,16 sedangkan nilai maksimum adalah 0,23. Nilai rata-rata AKRU sesuai dengan statistik deskriptif adalah -- 0,0068 dengan standar deviasi sebesar 0,06275. Nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa variabel AKRU memiliki sebaran data yang sempit antara nilai AKRU terendah dengan nilai AKRU tertinggi.

b. Analisis Statistik Deskriptif Untuk Variabel DEFERRED

Variabel DEFERRED yang diproksikan dengan menggunakan indikator *DEFERREDTAX* merupakan pajak tangguhan dibagi dengan total aset pada periode sebelumnya. *DEFERREDTAX* digunakan untuk mengukur besar kecilnya pajak tangguhan sebuah perusahaan. Semakin besar *DEFERREDTAX* mengindikasikan semakin tinggi tingkat pajak tangguhan. Sebanyak 174 sampel menunjukkan nilai minimum DEFERRED adalah -- 0,04 sedangkan nilai maksimum adalah 0,04. Nilai rata-rata DEFERRED sesuai dengan statistik deskriptif adalah 0,0021 dengan standar deviasi sebesar 0,01379. Nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa variabel DEFERRED memiliki sebaran data yang sempit antara nilai DEFERRED terendah dengan nilai DEFERRED tertinggi.

c. Analisis Statistik Deskriptif Untuk Variabel TAXPLAN

Variabel TAXPLAN yang diproksikan dengan menggunakan indikator *Tax Retention Rate (TRR)* merupakan total laba bersih dibagi dengan laba sebelum pajak. *TRR* digunakan untuk mengukur tingkat perencanaan pajak sebuah perusahaan. Semakin tinggi *TRR* mengindikasikan semakin tinggi tingkat perencanaan pajak. Sebanyak 174 sampel menunjukkan nilai minimum TAXPLAN adalah 0,07 sedangkan nilai maksimum adalah 1,46. Nilai rata-rata TAXPLAN sesuai dengan statistik deskriptif adalah 0,7325 dengan standar deviasi sebesar 0,12936. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa variabel TAXPLAN memiliki

sebaran data yang luas antara nilai TAXPLAN terendah dengan nilai TAXPLAN tertinggi.

d. Analisis Statistik Deskriptif Untuk Variabel EARNING

Variabel EARNING yang diprosikan dengan menggunakan indikator *EM* merupakan pembagian antara laba bersih dengan nilai pasar ekuitas awal tahun. *EM* digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya praktik manajemen laba sebuah perusahaan. Semakin besar *EM* mengindikasikan semakin tinggi tingkat praktik manajemen laba yang dilakukan. Sebanyak 174 sampel menunjukkan nilai minimum EARNING adalah 0,00 sedangkan nilai maksimum adalah 17,99. Nilai rata-rata EARNING sesuai dengan statistik deskriptif adalah 2,5346 dengan standar deviasi sebesar 3,86090. Nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa variabel EARNING memiliki sebaran data yang sempit antara nilai EARNING terendah dengan nilai EARNING tertinggi.

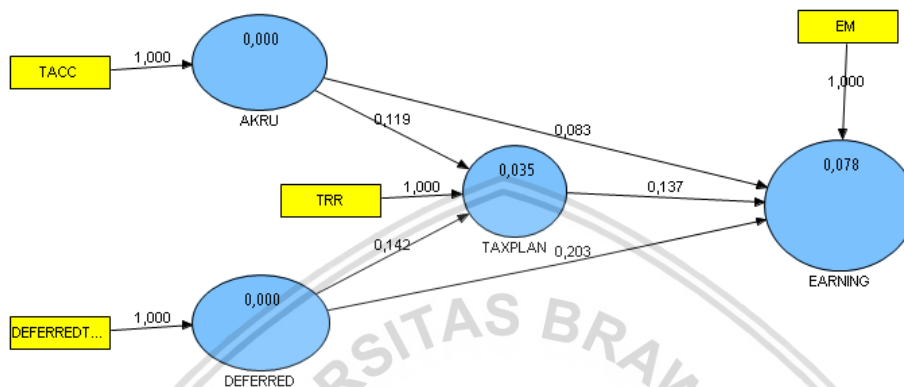
2. Analisis Smart Partial Least Square (SmartPLS)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS karena terdapat empat variabel laten yang dibentuk dengan indikator *formative* dan membentuk efek *intervening*. Langkah-langkah yang digunakan dimulai dengan membuat diagram jalur, evaluasi model pengukuran, *goodness of fit model*, dan evaluasi model struktural.

a. Proses Membuat Diagram Jalur

Diagram jalur (*diagram path*) menjelaskan pola hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Diagram jalur dapat menjelaskan

model struktural (*inner model*), model pengukuran (*outer model*), validitas, koefisien pengaruh langsung, dan koefisien pengaruh tidak langsung.



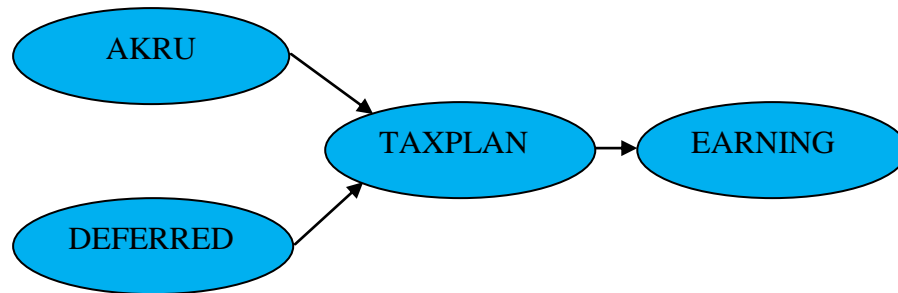
Gambar 4.1 Diagram Jalur
Sumber : diolah peneliti, 2018

b. Analisis Diagram Jalur

Analisis diagram jalur terdiri dari 4 tahap, analisis model struktural, analisis model pengukuran, analisis bentuk variabel dan indikator, dan estimasi model.

1) Model Struktural (*inner model*)

Pada tahap ini, peneliti memformulasikan model struktural. Variabel-variabel tersebut adalah AKRU dan DEFERRED (eksogen), TAXPLAN (*intervening*), dan EARNING (endogen). Model struktural menunjukkan spesifikasi hubungan antar variabel laten (model struktural).

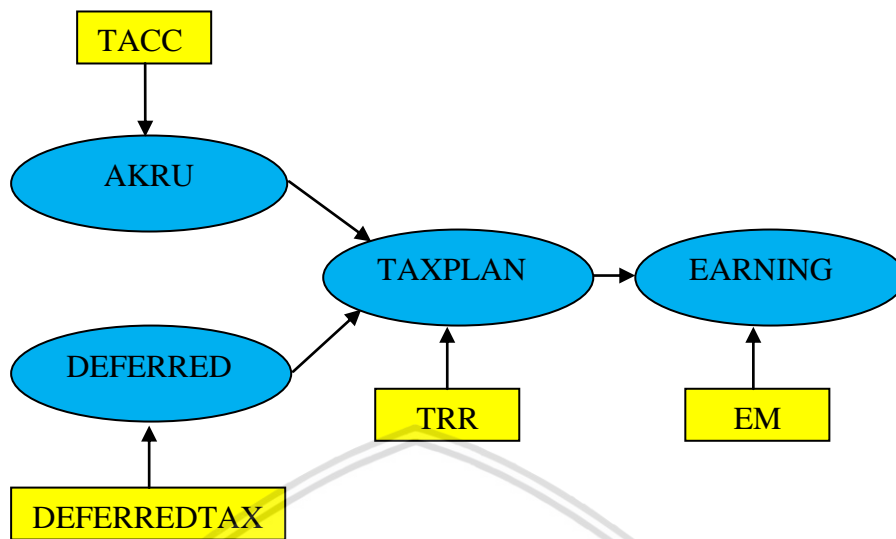


Gambar 4.2 Inner Model

Sumber : diolah peneliti, 2018

2) Merancang Model Pengukuran (*outer model*)

Pada tahap ini, peneliti mendefinisikan dan menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya apakah bersifat reflektif atau formatif. Variabel-variabel tersebut adalah AKRU dengan indikatornya TACC, DEFERRED dengan indikator DEFERREDTAX, TAXPLAN dengan indikator TRR, dan EARNING dengan indikator EM. Hubungan ini bersifat formatif karena dalam penelitian ini indikator membentuk variabel-variabel laten dan apabila menggunakan indikator lain maka makna variabel laten akan berubah. Oleh karena itu, arah panah dari indikator menuju ke variabel laten.



Gambar 4.3 Outer Model
Sumber : diolah peneliti, 2018

3) Analisis Bentuk Variabel dan Indikator

- 1) Konstruk teoritis (*theoretical constructs*) yang menunjukkan suatu variabel laten digambar dengan bentuk oval atau lingkaran.

Konstruk teoritis dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar 4.1 dengan variabel-variabel AKRU dan DEFERRED (eksogen), TAXPLAN (*intervening*), dan EARNING (endogen).

- 2) Variabel-variabel terukur atau indikator digambar dengan bentuk kotak

Indikator dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar 4.1 berupa TACC, DEFERREDTAX, TRR, dan EM.

4) Estimasi Model

Pada langkah ini, ada tiga skema pemilihan *weighting* dalam proses estimasi model, yaitu *factor weighting scheme*, *centroid weighting scheme*, dan *path weighting scheme*. Penelitian ini menggunakan *path*

weighting scheme dikarenakan untuk mengestimasi koefisien jalur dari diagram jalur yang tergambar di gambar 4.1.

c. Evaluasi Model Pengukuran

Model penelitian ini terdiri dari 4 (empat) konstruk yaitu AKRU, DEFERRED, EARNING, dan TAXPLAN. Evaluasi model pengukuran merupakan tahapan untuk menguji validitas dan reliabilitas suatu konstruk serta mengkonversikan diagram jalur ke model pengukuran.

1) Evaluasi Validitas

Outer model (weights or loadings) model formatif dimaksudkan untuk mengetahui valid tidaknya suatu indikator dalam mengukur variabel yang bersifat formatif. Suatu indikator dikatakan valid apabila nilai *outer model (weights or loadings)* lebih dari 0,5 (Abdillah dan Jogyanto, 2015:195).

Tabel 4.2 Outer Model

Variabel Laten	Indikator	Weights
AKRU	TACC	1.000
DEFERRED	DEFERREDTAX	1.000
EARNING	EM	1.000
TAXPLAN	TRR	1.000

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa indikator yang mengukur variabel AKRU, DEFERRED, EARNING, dan TAXPLAN menghasilkan nilai *outer model* sama dengan satu. Dengan demikian indikator TACC, DEFERRED TAX, EM, dan TRR yang mengukur variabel tersebut dinyatakan valid.

2) Evaluasi Reliabilitas

Perhitungan yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas konstruk dalam smartPLS adalah *cronbach alpha* dan *composite reliability*. Namun, pada konstruk formatif nilai *composite reliability* dan nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel AKRU, DEFERRED, EARNING, dan TAXPLAN tidak dapat diketahui karena uji reliabilitas konstruk tidak dapat dilakukan pada konstruk formatif (Abdillah dan Jogiyanto, 2015:21).

3) Konversi Diagram Jalur Ke Model Pengukuran

Konversi diagram jalur ke dalam model pengukuran dapat diketahui melalui penjelasan berikut :

Tabel 4.3 Konversi Diagram Jalur Ke Model Pengukuran

Variabel Laten	Indikator	Weights
AKRU	TACC	1.000
DEFERRED	DEFERREDTAX	1.000
EARNING	EM	1.000
TAXPLAN	TRR	1.000

Model pengukuran setiap variabel adalah sebagai berikut :

$$\text{AKRU} = 1.000 \text{ TACC}$$

$$\text{DEFERRED} = 1.000 \text{ DEFERREDTAX}$$

$$\text{EARNING} = 1.000 \text{ EM}$$

$$\text{TAXPLAN} = 1.000 \text{ TRR}$$

Model tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bobot pengukuran indikator TACC terhadap variabel AKRU sebesar 1.000 menunjukkan bahwa indikator TACC membentuk variabel AKRU secara

positif. Hal ini berarti indikator TACC cenderung dapat memperbaiki variabel AKRU.

2. Bobot pengukuran indikator DEFERREDTAX terhadap variabel DEFERRED sebesar 1.000 menunjukkan bahwa indikator DEFERREDTAX membentuk variabel DEFERRED secara positif. Hal ini berarti indikator DEFERREDTAX cenderung dapat memperbaiki variabel DEFERRED.
3. Bobot pengukuran indikator EM terhadap variabel EARNING sebesar 1.000 menunjukkan bahwa indikator EM membentuk variabel EARNING secara positif. Hal ini berarti indikator EM cenderung dapat memperbaiki variabel EARNING.
4. Bobot pengukuran indikator TRR terhadap variabel TAXPLAN sebesar 1.000 menunjukkan bahwa indikator TRR membentuk variabel TAXPLAN secara positif. Hal ini berarti indikator TRR cenderung dapat memperbaiki variabel TAXPLAN.

d. Goodness of Fit Model

Goodness of fit Model digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel eksogen untuk menjelaskan keragaman variabel endogen atau dengan kata lain untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel eksogen terhadap variabel endogen. *Goodness of fit Model* dalam analisis SmartPLS dilakukan dengan menggunakan *R-Square* (R^2) dan *Q-Square predictive relevance* (Q^2).

Adapun hasil *Goodness of fit Model* yang telah diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Goodness of fit Model

Variabel	R^2
TAXPLAN	0.035
EARNING	0.078
$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2)$ $Q^2 = 1 - (1 - 0.035) (1 - 0.078) = 0.1103$	

R-square variabel TAXPLAN sebesar 0.035 atau 3.5%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keragaman variabel TAXPLAN mampu dijelaskan oleh variabel AKRU dan DEFERRED sebesar 3.5%, sedangkan sisanya sebesar 96.5% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Berikutnya *R-square* variabel EARNING bernilai 0.078 atau 7.8%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keragaman variabel EARNING mampu dijelaskan oleh variabel AKRU dan DEFERRED dan TAXPLAN sebesar 7.8%, sedangkan sisanya sebesar 92.2% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Q-Square predictive relevance (Q^2) bernilai 0.1103 atau 11.03%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keragaman variabel EARNING mampu dijelaskan oleh model secara keseluruhan sebesar 11.03%.

e. Evaluasi Model Struktural

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen, variabel *intervening*, dan variabel endogen dalam penelitian ini menggunakan *software* SmartPLS 2.0. Evaluasi model struktural melalui

tahapan pengujian hipotesis *direct effect*, pengujian hipotesis *indirect effect*, dan mengkonversikan diagram jalur ke model struktural.

1) Pengujian Hipotesis Direct Effect

Pengujian *direct effect* digunakan untuk melihat pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Uji signifikansi digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila nilai T Statistics \geq T Tabel (1.96) maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan variabel eksogen terhadap variabel endogen (Hussein, 2015:20). Hasil pengujian signifikansi dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel 4.5 Direct Effect

Eksogen	Endogen	Koefisien Langsung	T Statistics
AKRU	TAXPLAN	0.119	1.924
DEFERRED	TAXPLAN	0.142	3.519
AKRU	EARNING	0.083	1.317
TAXPLAN	EARNING	0.137	2.920
DEFERRED	EARNING	0.203	4.043

Berdasarkan tabel diatas dapat diinformasikan bahwa :

1. Pengaruh AKRU terhadap TAXPLAN menghasilkan koefisien 0.119 yang menunjukkan bahwa AKRU memiliki pengaruh negatif terhadap TAXPLAN. nilai T Statistik sebesar 1.924 menunjukkan bahwa nilai T Statistik $<$ T Tabel (1.96). Hal ini berarti terdapat pengaruh tidak signifikan AKRU terhadap TAXPLAN.
2. Pengaruh DEFERRED terhadap TAXPLAN menghasilkan koefisien 0.142 yang menunjukkan bahwa DEFERRED memiliki pengaruh positif terhadap TAXPLAN. Nilai T Statistik sebesar 3.519 menunjukkan bahwa nilai T

Statistik $>$ T Tabel (1.96). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan DEFERRED terhadap TAXPLAN. Hal ini berarti semakin tinggi DEFERRED maka cenderung dapat meningkatkan TAXPLAN.

3. Pengaruh AKRU terhadap EARNING menghasilkan koefisien 0.083 yang menunjukkan bahwa AKRU memiliki pengaruh positif terhadap EARNING. Nilai T Statistik sebesar 1.317 menunjukkan bahwa nilai T Statistik $<$ T Tabel (1.96). Hal ini berarti terdapat pengaruh tidak signifikan AKRU terhadap EARNING.
4. Pengaruh TAXPLAN terhadap EARNING menghasilkan koefisien 0.137 yang menunjukkan bahwa TAXPLAN memiliki pengaruh positif terhadap EARNING. Nilai T Statistik sebesar 2.920 menunjukkan bahwa nilai T Statistik $>$ T Tabel (1.96). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan TAXPLAN terhadap EARNING. Hal ini berarti semakin tinggi TAXPLAN maka cenderung tidak dapat meningkatkan EARNING.
5. Pengaruh DEFERRED terhadap EARNING menghasilkan koefisien 0.203 yang menunjukkan bahwa DEFERRED memiliki pengaruh positif terhadap EARNING. Nilai T Statistik sebesar 4.043. Hasil T Statistik $>$ T Tabel (1.96). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan DEFERRED terhadap EARNING. Hal ini berarti semakin tinggi DEFERRED maka cenderung dapat meningkatkan EARNING.

2) Pengujian Hipotesis Indirect Effect

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh secara tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen

melalui variabel *interveningnya* dengan menggunakan *Sobel Test*. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila $p\text{ value} < \text{level of significance}$ ($\alpha = 5\%$) maka dinyatakan terdapat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel *interveningnya*. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat melalui ringkasan dalam tabel berikut :

Tabel 4.6 Sobel Test

Sobel Test				
Eksogen	Intervening	Endogen	Indirect Coef.	P value
AKRU	TAXPLAN	EARNING	0.016	0.112
DEFERRED	TAXPLAN	EARNING	0.019	0.024

Berdasarkan tabel diatas dapat diinformasikan bahwa :

1. Pengaruh AKRU terhadap EARNING melalui TAXPLAN, menghasilkan koefisien tidak langsung sebesar 0.016 yang bermakna AKRU memiliki pengaruh positif terhadap EARNING melalui TAXPLAN. Nilai $p\text{ value}$ sebesar 0.112 menunjukkan bahwa nilai $p\text{ value} > \text{level of significance}$ ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti terdapat pengaruh tidak signifikan AKRU terhadap EARNING melalui TAXPLAN. Pengaruh tidak signifikan menunjukkan variabel TAXPLAN tidak terbukti dapat digunakan sebagai variabel *intervening* diantara variabel AKRU dan EARNING.
2. Pengaruh DEFERRED terhadap EARNING melalui TAXPLAN, menghasilkan koefisien tidak langsung sebesar 0.019 yang bermakna DEFERRED memiliki pengaruh positif terhadap EARNING melalui TAXPLAN. Nilai $p\text{ value}$ sebesar 0.024 menunjukkan bahwa nilai $p\text{ value} < \text{level of significance}$ ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan DEFERRED terhadap EARNING melalui TAXPLAN. Pengaruh tidak

signifikan menunjukkan variabel TAXPLAN tidak terbukti dapat digunakan sebagai variabel intervening diantara variabel AKRU dan EARNING.

3) Konversi Diagram Jalur ke dalam Model Struktural

Konversi diagram jalur dalam model pengukuran dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh secara langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. Adapun efek model secara langsung, tidak langsung dan efek total sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.7 Konversi Diagram Jalur ke dalam Model Struktural

Eksogen	Intervening	Endogen	Direct	Indirect	Total
AKRU		TAXPLAN	0.119	-	0.119
AKRU	TAXPLAN	EARNING	0.083	0.016	0.099
DEFERRED		TAXPLAN	0.142	-	0.142
DEFERRED	TAXPLAN	EARNING	0.203	0.019	0.222
TAXPLAN		EARNING	0.137	-	0.137

Keterangan : * (Signifikan)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa model struktural sistematis yang terbentuk adalah :

Persamaan 1 :

$$\text{TAXPLAN} = 0.119 \text{ AKRU} + 0.142 \text{ DEFERRED}$$

Persamaan 2 :

$$\text{EARNING} = 0.083 \text{ AKRU} + 0.203 \text{ DEFERRED} + 0.137 \text{ TAXPLAN}$$

C. Pembahasan

1. Hipotesis Pertama: Pengaruh Basis AkruaI Terhadap Perencanaan Pajak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa basis akrual berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Pengaruh positif berarti semakin banyak transaksi yang diakui perusahaan menggunakan basis akrual terdapat kontribusi perencanaan pajak yang tinggi pula. Hal tersebut dibuktikan dengan koefisien langsung AKRU terhadap TAXPLAN bernilai positif. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yona (2018) yang mendapati bahwa terdapat pengaruh positif pada variabel basis akrual dalam praktik perencanaan pajak dikarenakan basis akrual masih dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat perencanaan pajak dengan mempercepat pengakuan biaya dan mengakui penghasilan di periode selanjutnya untuk menekan pajak yang terutang kepada Negara pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pengakuan di awal menyebabkan agen dapat mengatur besar kecilnya laba sebelum pajak dengan mempercepat pengakuan biaya sehingga pajak rendah. Hal tersebut dikarenakan tidak perlu ada bukti transaksi fisik pada pengakuan basis akrual (Sulistyanto, 2014:161). Maka dari itu, basis akrual dapat digunakan untuk sebagai alat melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dalam hal ini bertujuan untuk menghasilkan pajak yang rendah.

Ini juga menunjukkan bahwa basis akrual berkontribusi kecil pada praktek perencanaan pajak karena t-statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi

kurang dari 1.96. Kecenderungan *agent* yang melakukan perencanaan pajak untuk tujuan menghasilkan pajak yang rendah akan membuat *Political Cost* yang besar juga. Apabila *agent* diketahui dengan sengaja menghindari biaya politik, maka utang pajak bertambah. Selain itu, juga akan timbul sanksi karena utang pajak berarti pajak yang belum dibayar ditambah dengan sanksi. Akan tetapi, *agent* lebih memilih memanfaatkan menghindari biaya politik agar menghasilkan pajak yang rendah. Hal tersebut akan membuktikan *agent* siap atas sanksi yang akan diterima apabila diketahui saat pemeriksaan. Kesimpulannya, Poin ketiga pada teori akuntansi positif yaitu *The Political Cost Hypothesis* tidak terbukti dalam penelitian ini.

Pengenaan pajak badan usaha diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tetapi dalam peraturan tersebut perencanaan pajak tidak diatur secara jelas. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 hanya mengatur tentang subjek dan objek apa saja yang dikenakan pajak maupun yang dikecualikan dari pengenaan pajak beserta tarifnya.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Syanthi *et al.*, (2012) mengungkapkan bahwa basis akrual tidak terbukti terjadi dalam melakukan perencanaan pajak. Hal tersebut dikarenakan tahun penelitian yang diambil bersamaan dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan. Sehingga basis akrual tidak berkontribusi pada praktek perencanaan pajak akibat penurunan tarif pajak. Sementara itu, dalam

penelitian ini ditemukan bahwa basis akrual berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Pengaruh positif yang dimaksud adalah penggunaan basis akrual yang semakin besar diimbangi dengan perencanaan pajak yang juga semakin tinggi.

2. Hipotesis Kedua: Pengaruh Basis Akrual Terhadap Manajemen Laba

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa basis akrual berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Tanda positif tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak transaksi yang diakui menggunakan basis akrual maka perusahaan cenderung menerapkan manajemen laba untuk tujuan membuat laba bersih menjadi tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sumbari dkk., (2017) yang menyatakan bahwa basis akrual mempunyai pengaruh positif untuk mengukur manajemen laba karena basis akrual tidak membutuhkan bukti kas secara fisik sehingga *agent* dapat dengan leluasa mengelola pendapatan dan beban sesuai keinginan.

Hal tersebut mendukung teori Sulistyanto (2014:161) yang mengungkapkan basis akrual tidak membutuhkan adanya kas fisik masuk dan keluar. Sehingga, penggunaan basis akrual memberikan kesempatan untuk *agent* mengelola laba dengan mempercepat pengakuan pendapatan dan menunda pengakuan beban dengan tujuan menghasilkan laba bersih yang tinggi.

Keputusan untuk menerapkan manajemen laba menunjukkan bahwa *asymmetric information* yang dikemukakan oleh Teori Agensi terbukti dalam

penelitian ini. *Agent* yang memiliki informasi yang lebih banyak daripada *principal* memanfaatkan penggunaan basis akrual untuk mengatur laba tanpa sepengetahuan *principal*. *Agent* juga tidak menyajikan keseluruhan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh *principal* dengan benar. *Asymmetric information* bermakna terdapat informasi yang asimetris karena adanya distribusi informasi yang tidak sesuai antara *principal* dan *agent*.

3. Hipotesis Ketiga: Pengaruh Basis Akrual Terhadap Manajemen Laba Melalui Perencanaan Pajak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa basis akrual berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba melalui perencanaan pajak. Hasil tersebut dibuktikan dengan perkalian antara hasil koefisien langsung AKRU terhadap TAXPLAN yang bernilai positif dan koefisien langsung TAXPLAN terhadap EARNING positif. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak terbukti dapat menjadi variabel *intervening* diantara penggunaan basis akrual dan manajemen laba. Keterbaharuan penelitian ini yang tidak ditemukan di penelitian lainnya yaitu bahwa basis akrual berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba melalui perencanaan pajak sebagai variabel *interveningnya*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Suranggane (2007) yang menyatakan bahwa basis akrual memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya manajemen laba untuk mendeteksi tingkat manajemen laba di sebuah perusahaan untuk menghindari melaporkan kerugian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Basis akrual dapat digunakan sebagai alat melakukan manajemen laba untuk menghasilkan laba bersih yang tinggi. Basis akrual juga dapat digunakan sebagai alat melakukan perencanaan pajak untuk menghasilkan pajak yang terutang rendah. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak dapat digunakan sebagai variabel *intervening* antara basis akrual dan manajemen laba. Basis akrual dapat digunakan sebagai alat perencanaan pajak dengan mempercepat pengakuan biaya akrual sehingga laba sebelum pajak kecil. Pengakuan di awal menyebabkan *agent* dapat mengatur besar kecilnya laba sebelum pajak dengan mempercepat pengakuan biaya sehingga pajak rendah. Hal tersebut dikarenakan tidak perlu ada bukti transaksi fisik pada pengakuan basis akrual (Sulistyanto, 2014:161). Maka dari itu, basis akrual dapat digunakan untuk sebagai alat melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dalam hal ini bertujuan untuk menghasilkan pajak yang rendah.

Basis akrual juga dapat digunakan sebagai alat manajemen laba dengan mengakui pendapatan yang lebih besar. Kecenderungan *agent* melakukan praktek manajemen laba untuk memperoleh bonus yang tinggi menyebabkan *principal* tidak dapat memperoleh pengetahuan tentang informasi keuangan perusahaan yang jujur dan lengkap karena seluruh informasi perusahaan berada di tangan *agent*. Terdapat informasi yang asimetris karena adanya distribusi informasi yang tidak sesuai antara *principal* dan *agent*. Hal ini bermakna bahwa *Asymmetric information* yang dikemukakan oleh Teori Agensi terbukti dalam penelitian ini. *Agent* yang cenderung melakukan praktek manajemen laba melalui perencanaan pajak dengan menggunakan

basis akrual akan melaporkan hasil tidak sesuai dengan kenyataan dan membuat laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pribadi agar menghasilkan laba bersih yang tinggi sehingga *agent* akan memperoleh bonus.

Pengenaan pajak perusahaan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 hanya mengatur tentang subjek dan objek apa saja yang dikenakan pajak maupun yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Sementara itu, peraturan tentang manajemen laba belum diatur secara jelas di Indonesia. Hal tersebut memicu terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Negara. Bahkan, perusahaan pun dapat mengalami kemunduran dan mendapat sanksi pajak yang tidak sedikit apabila salah dalam menerapkan manajemen laba dikarenakan tidak terdapat standarisasi tentang tingkat manajemen laba yang diperbolehkan dan bagaimana mekanismenya.

4. Hipotesis Keempat: Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Perencanaan Pajak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Selain itu, pajak tangguhan juga berpengaruh signifikan terhadap terjadinya perilaku perencanaan pajak sebuah perusahaan. Pengaruh positif yang dihasilkan oleh pajak tangguhan

menunjukkan bahwa pajak tangguhan yang semakin besar akan diimbangi dengan perencanaan pajak yang besar juga yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini membuktikan bahwa pajak tangguhan dapat dijadikan alat dalam praktek perencanaan pajak perusahaan manufaktur dalam rangka untuk menghasilkan pajak yang terhutang rendah karena *agent* dapat mengatur pengakuan aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan sesuai dengan keinginan dan kondisi perusahaan. Apabila *agent* menginginkan muncul aset pajak tangguhan agar pajak di masa yang akan datang kecil, maka pengakuan penghasilan di masa kini harus lebih tinggi. Sementara itu, apabila *agent* menghendaki muncul liabilitas pajak tangguhan sehingga pajak di masa yang sekarang kecil dapat dilakukan dengan mengakui penghasilan yang lebih besar di masa yang akan datang.

Kecenderungan *agent* melakukan perencanaan pajak yang tinggi guna menghasilkan pajak yang rendah membuktikan apabila *The Political Cost Hypothesis* tidak terbukti dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan *agent* cenderung memanfaatkan metode pengakuan pajak tangguhan yang diatur di PSAK 46 untuk menekan pajak yang terutang perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak tangguhan berkontribusi pada praktek perencanaan pajak karena semakin perusahaan menghasilkan pajak yang rendah melalui pajak tangguhan, semakin *agent* menghindari biaya politik yang besar. Selain itu, *agent* juga sudah siap menerima sanksi pajak apabila terdeteksi secara sengaja menghindari biaya politik yang menyebabkan biaya politik semakin besar.

Pengenaan pajak perusahaan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tetapi dalam peraturan tersebut perencanaan pajak tidak diatur secara jelas. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 hanya mengatur tentang subjek dan objek apa saja yang dikenakan pajak maupun yang dikecualikan dari pengenaan pajak beserta tarifnya. Pada kesempatan ini, perusahaan memanfaatkan berbagai celah untuk menghemat pajak dalam ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

5. Hipotesis Kelima: Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hakim (2015) yang menyimpulkan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada Perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia karena pajak tangguhan masih dapat melengkapi langkah-langkah untuk mendeteksi tingkat manajemen laba untuk menghindari melaporkan kerugian.

Pajak tangguhan memiliki pengaruh positif yang menunjukkan bahwa pajak tangguhan memiliki hubungan lurus dengan perilaku manajemen laba perusahaan. Hubungan lurus yang dimaksud adalah semakin tinggi persentase pajak tangguhan maka perusahaan cenderung akan menerapkan manajemen laba. Hal tersebut dapat terjadi karena pajak tangguhan yang terdiri dari aset

pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dapat menyebabkan pengaruh pada laba bersih perusahaan.

Aset pajak tangguhan menyebabkan jumlah pajak yang kecil pada periode mendatang. Aset pajak tangguhan dapat dipilih untuk mendapatkan laba bersih yang tinggi di masa depan sesuai dengan jenis manajemen laba *income minimization* yang bertujuan apabila perusahaan membutuhkan reorganisasi atau restrukturisasi. Sementara itu, liabilitas pajak tangguhan dapat dipilih untuk menciptakan laba bersih di masa kini guna menghindari kerugian sesuai dengan jenis manajemen laba *income maximization*. PSAK 46 juga memperbolehkan perusahaan untuk mengakui besarnya pajak tangguhan sehingga *agent* dapat dengan bebas memilih metode akuntansi guna menilai pengakuan pajak tangguhan.

Keputusan untuk menerapkan manajemen laba menunjukkan bahwa *asymmetric information* yang dikemukakan oleh Teori Agensi terbukti dalam penelitian ini. *Agent* memiliki informasi yang lebih banyak daripada *principal* dan memanfaatkan pajak tangguhan untuk mengatur laba tanpa sepengetahuan *principal*, namun *agent* tidak menyajikan keseluruhan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh *principal* dengan benar. *Asymmetric information* bermakna terdapat informasi yang asimetris karena adanya distribusi informasi yang tidak sesuai antara *principal* dan *agent*. Hasil yang positif menunjukkan bahwa *agent* dalam hal ini cenderung melakukan praktek manajemen laba dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan *principal*.

Pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang aset dan beban pajak tangguhan dengan menggunakan model revaluasi maupun menggunakan model nilai wajar. Pada kesempatan ini, perusahaan seharusnya dapat memanfaatkan berbagai celah untuk memaksimalkan laba bersih dalam ketentuan peraturan akuntansi yang berlaku.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Barus dan Setiawati (2015) yang menyatakan bahwa pajak tangguhan memiliki pengaruh negatif terhadap praktek manajemen laba. Hal tersebut dikarenakan bahwa timbulnya pajak tangguhan adalah dari kegiatan perencanaan pajak yang hanya mempengaruhi laba fiskal. Sementara itu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Pengaruh positif yang dimaksud adalah pajak tangguhan yang semakin besar membuktikan manajemen laba yang juga semakin tinggi.

6. Hipotesis Keenam: Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Melalui Perencanaan Pajak

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba melalui perencanaan pajak. Hasil tersebut dibuktikan dengan perkalian antara hasil koefisien langsung DEFERRED terhadap TAXPLAN yang bernilai positif dan koefisien langsung TAXPLAN terhadap EARNING positif. Perencanaan pajak terbukti dapat menjadi variabel *intervening* diantara penggunaan pajak tangguhan dan

manajemen laba. Keterbaharuan penelitian ini yang tidak ditemukan di penelitian lainnya yaitu bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba melalui perencanaan pajak sebagai variabel *interveningnya*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Perwita *et al.*, (2014) yang mengungkapkan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba dikarenakan masih dapat melengkapi langkah-langkah untuk mendeteksi tingkat manajemen laba untuk menghindari melaporkan kerugian.

Pengaruh positif signifikan yang dihasilkan oleh penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tingginya pajak tangguhan diimbangi dengan manajemen laba yang juga semakin tinggi melalui perencanaan pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena pajak tangguhan yang terdiri dari aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dapat menyebabkan pengaruh pada laba bersih perusahaan. Aset pajak tangguhan menyebabkan jumlah pajak yang kecil pada periode mendatang. Aset pajak tangguhan dapat dipilih untuk mendapatkan laba bersih yang tinggi di masa depan sesuai dengan jenis manajemen laba *income minimization* yang bertujuan apabila perusahaan membutuhkan reorganisasi atau restrukturisasi.

Sementara itu, liabilitas pajak tangguhan dapat dipilih untuk menciptakan laba bersih di masa kini guna menghindari kerugian sesuai dengan jenis manajemen laba *income maximization*. PSAK 46 juga memperbolehkan perusahaan untuk mengakui besarnya pajak tangguhan sehingga *agent* dapat

dengan bebas memilih metode akuntansi guna menilai pengakuan pajak tangguhan.

Kecenderungan *agent* yang memilih melakukan manajemen laba melalui perencanaan pajak untuk menghasilkan laba bersih yang tinggi dengan cara membuat pajak yang rendah akan membuat *Political Cost* yang tinggi. Apabila *agent* diketahui dengan sengaja menghindari biaya politik, maka utang pajak bertambah. Selain itu, juga akan timbul sanksi karena utang pajak berarti pajak yang belum dibayar ditambah dengan sanksi. Namun, *agent* juga sudah siap menerima sanksi pajak apabila terdeteksi secara sengaja menghindari biaya politik yang menyebabkan biaya politik semakin besar karena tujuan *agent* dalam penelitian ini adalah untuk menciptakan laba bersih yang tinggi. Kesimpulannya, poin ketiga pada teori akuntansi positif yaitu *The Political Cost Hypothesis* tidak terbukti dalam penelitian ini.

Pengenaan pajak perusahaan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tetapi dalam peraturan tersebut perencanaan pajak tidak diatur secara jelas. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 hanya mengatur tentang subjek dan objek apa saja yang dikenakan pajak maupun yang dikecualikan dari pengenaan pajak beserta tarifnya.

Sementara itu, peraturan tentang manajemen laba belum diatur secara jelas di Indonesia. Hal tersebut memicu terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Negara. Bahkan, perusahaan pun dapat mengalami kemunduran dan

mendapat sanksi pajak yang besar apabila salah dalam menerapkan manajemen laba dikarenakan tidak terdapat standarisasi tentang tingkat manajemen laba yang diperbolehkan dan apa saja persyaratannya. Sementara itu, pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang aset dan beban pajak tangguhan dengan menggunakan model revaluasi maupun menggunakan model nilai wajar.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Barus dan Setiawati (2015) yang menyatakan bahwa pajak tangguhan memiliki pengaruh negatif terhadap praktek manajemen laba. Hal tersebut dikarenakan bahwa timbulnya pajak tangguhan adalah dari kegiatan perencanaan pajak yang hanya mempengaruhi laba fiskal. Sementara itu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui perencanaan pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa melalui perencanaan pajak, semakin tinggi pajak tangguhan diimbangi dengan tingginya manajemen laba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penggunaan basis akrual dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba dengan perencanaan pajak sebagai variabel *intervening* studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 dapat ditarik kesimpulan bahwa :

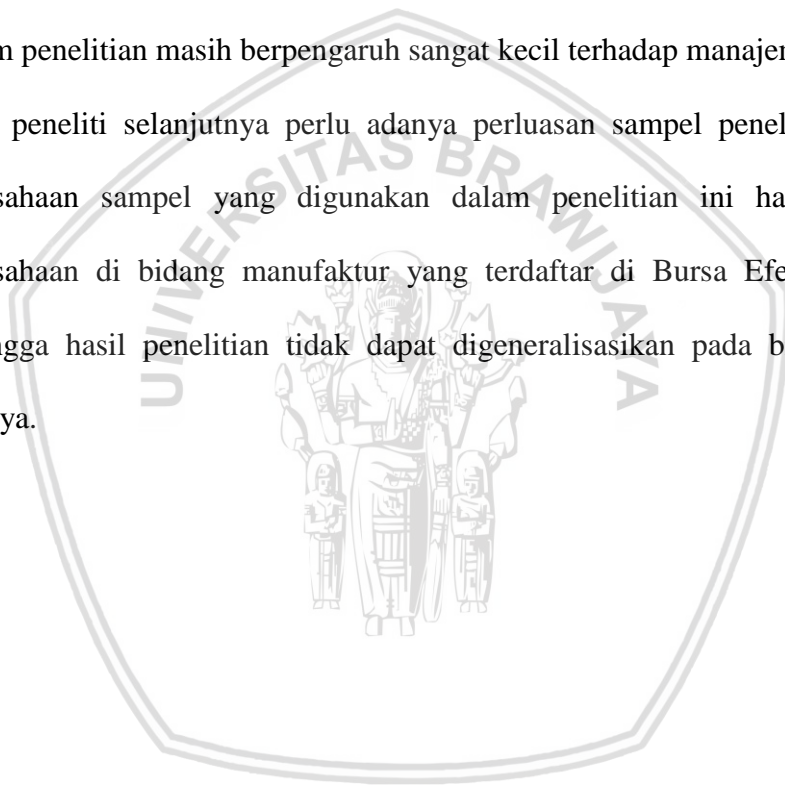
1. Penggunaan basis akrual berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak
2. Penggunaan basis akrual berpengaruh positif terhadap manajemen laba
3. Penggunaan basis akrual berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui perencanaan pajak
4. Pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak
5. Pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba
6. Pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba melalui perencanaan pajak

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan keterbatasan pada penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam mengatur manajemen laba. Salah satunya peraturan yang membedakan istilah manajemen laba, rekayasa laba, maupun manipulasi laba secara jelas dan mudah dipahami agar tidak terdapat ambiguitas.

2. Bagi perusahaan diperlukan adanya kepastian faktor-faktor yang menyebabkan manajemen laba yang benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia agar tidak mengakibatkan hal yang buruk pada perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diperlukan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba, dikarenakan variabel eksogen dalam penelitian masih berpengaruh sangat kecil terhadap manajemen laba.
4. Bagi peneliti selanjutnya perlu adanya perluasan sampel penelitian karena perusahaan sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas perusahaan di bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada bidang usaha lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdillah, Willy & Prof. Jogiyanto. 2015. *Partial Least Square (PLS)*. Yogyakarta: Andi
- Agoes, Sukrisno & Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Baridwan, Prof. Dr. Zaki. 2008. *Intermediate Accounting Edisi 8*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Belkaoui, Ahmed R. 2007. *Accounting Theory Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, Prof. Dr. H. Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBS SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Govindarajan. 2005. *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat
- Hussein, Ananda Sabil. 2015. *Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan SmartPLS 3.0*. Malang: Universitas Brawijaya
- Ilyas, DR. Wirawan B. & Diaz Priantara. 2015. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Jusup, Al. Haryono. 2005. *Dasar-dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Neolaka, Prof. Dr. Ir. Amos. 2014. *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pohan, Drs. Chairil Anwar. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara
- Purba, Marisi P & Andreas. 2009. *Akuntansi Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Scott, William R. 2000. *Financial Accounting Theory Second Edition*. Canada: Pretince Hall Inc.
- _____. 2006. *Financial Accounting Theory*. Canada: Pretince Hall Inc.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2011. *Perencanaan Pajak edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat

- _____. 2016. *Perencanaan Pajak edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis Cetaklan Ketujuh*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistyanto, H. Sri. 2014. *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Jakarta: PT. Grasindo
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

JURNAL

- Aditama, Ferry & Anna Purwaningsih. 2014. *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Modus Vol.26 (1): 33-50
- Arifah, Dista Amalia. 2012. *Praktek Teori Agensi Pada Entitas Publik Dan Non Publik*. Prestasi Vol. 9 (1)
- Astutik, Ratna Eka Puji & Titik Mildawati. 2016. *Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 5 (3)
- Blaylock, Bradley & Terry Shevlin & Ryan Wilson. 2010. *Tax Avoidance, Large Positive Book-tax Differences, and Earnings Persistence*. Seattle: University of Washington Foster School of Business
- Blouin, Jennifer & Jason DeBacker & Stephanie Sikes. 2010. *Temporary and Permanent Book-Tax Differences: Complements or Substitutes? Temporary and Permanent Book-Tax Differences: Complements or Substitutes?*. Washington, DC: The Liaison Capitol Hill
- Budiman, Taufik. 2012. *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan AkruaI Terhadap Indikasi Adanya Praktik Manajemen Laba*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia
- Eisenhardt, Kathleem. 1989. *Agency Theory: An Assessment and Review*. *Academy of Management Review*. 14:57-74
- Elingga, Muna. 2008. *Pengaruh Komponen Akuntansi AkruaI Sebagai Prediktor Arus Kas Koperasi Pada Saat Krisis dan Setelah Krisis*. Jurnal Akuntansi/Tahun XII No.2 (132:14)

- Fajri, Achmad & Sekar Mayangsari. 2012. *Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi Dan Laba Pajak Terhadap Manajemen Laba Dan Persistensi Laba*. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 12 (1)
- Falk, R.F. & N. B. Miller. 1992. *A Primer For Soft Modelling*. Akron, OH: The University of Akron
- Hakim, Arif Rachmad. 2015. *Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 (7)
- Hamzah, Ardi. 2014. *Deteksi Earnings Management Melalui Beban Pajak Tangguhan, Akrual, dan Arus Kas Operasi: Studi Pada Perusahaan Real Estate dan Property Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2008*. Madura: Universitas Trunojoyo
- Hu, Nanwei & Qiang Cao & Lulu Zheng. 2015. *Listed Companies' Income Tax Planning And Earnings Management: Based On China's Capital Market*. *Journal of Industrial Engineering and Management* Vol.8(2): 417-434
- Ifada, Luluk Muhimatul & Nova Wulandari. 2015. *The Effect Of Deferred Tax And Tax Planning Toward Earnings Management Practice: An Empirical Study On Non Manufacturing Companies Listed In Indonesia Stock Exchange In The Period Of 2008-2012*. *The International Journal of Organizational Innovation* Vol. 8 (1)
- Jao, Robert dan Gagaring Pagalung. 2011. *Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia*. *Jurnal Akuntansi & Auditing* Vol.8(1)
- Jensen, Michael C & William H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* Vol 3 (4)
- Kiswanto. 2009. *Deferred Tax Expense and Accruals Dalam Memprediksi Earning Management: Penelitian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Mills, L & K. Newberry. 2001. *The Influence of Tax and Non-Tax Costs on Book-Tax Reporting Differences: Public and Private Firms*. *The Journal of American Accounting Association* Vol.23: 1-19
- Perwita, Andarumi Mustikaning & Agung Nurmansyah. 2014. *Analisis Beban Pajak Tangguhan, Aktiva Pajak Tangguhan, dan Akrual Sebagai Prediktor Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013*. Surakarta: Universitas Setia Budi Surakarta

- Phillips, John & Morton Pincus & Sonja Olhott Rego. 2003. *Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense*. IA: The University of Iowa
- Pindiharti, Dewi. 2011. *Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Akrual Terhadap Earning Management*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Silitonga, Laorens. 2013. *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado*. Jurnal EMBA 2013. 1(3):829-839
- Sumbari, Sakina & Yetty Murni & Indah Masri. 2017. *Analisis Beban Pajak Tangguhan dan Akrual Dalam Mendeteksi Manajemen Laba*. ISBN 978-602-70083-4-2
- Sumomba, Christina Ranty & YB. Sigit Hutomo. 2012. *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba*. Kinerja Vol. 16 (2): 103-115
- Suranggane, Zulaikha. 2007. *Analisis Aktiva Pajak Tangguhan Dan Akrual Sebagai Prediktor Manajemen Laba: Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEJ*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.4 (1) hal. 77-94
- Susanti, Yessy. 2017. *Pengaruh Struktur Modal, Ekonomi Makro, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.6 (6)
- Syanthi, Nila Trisna & Made Sudarma & Erwin Saraswati. 2012. *Dampak Manajemen Laba Terhadap Perencanaan Pajak dan Persistensi Laba*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012
- Tan, Hwee-Cheng & Karim Jamal. 2005. *Effect of Accounting Discretion on Ability of Managers to Smooth Earnings*. Canada : University of Alberta
- Ujiyantho, Muh. Arief & Bambang Agus Pramuka. 2017. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi X AKPM 01
- Vladu, Alina Beatrice & Dacian Cuzdriorean. 2014. *Detecting Earnings Management: Insights from the last decade leading journals published research*. *Procedia Economics and Finance*. 15: 695 – 703
- Yona, Aqmarina. 2018. *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

- Yulianti. 2004. *Kemampuan Beban Pajak Tangguhan Dalam Mendeteksi Manajemen Laba*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.2 (1): 107-129
- Zeng, Tao. 2014. *Earnings management around tax rate reduction: evidence from China's 2007 corporate tax reform*. *Asian Review of Accounting* Vol. 22 (3): 304-317

PERATURAN

- Ikatan Akuntan Indonesia.1994. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- _____.2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- _____.2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- _____.2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46: Pajak Penghasilan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- _____.2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46: Pajak Penghasilan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- _____.2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia

INTERNET

- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. **“Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2014”**, diakses pada tanggal 15 Februari 2018 dari <http://pajak.go.id/>.....
- _____. 2015. **“Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2015”**, diakses pada tanggal 15 Februari 2018 dari <http://pajak.go.id/>.....
- _____. 2016. **“Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016”**, diakses pada tanggal 15 Februari 2018 dari <http://pajak.go.id/>.....
- Sari, Elisa Valenta. 2015. **“Penerimaan Pajak 2014 Meleset Rp 90 Triliun”**, diakses pada tanggal 9 Februari 2018 dari <http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/>.....

Sukamto. 2010. **“Jalan Panjang Kasus Pajak KPC”**, diakses pada tanggal 9 Januari 2018 dari <http://bisnis.tempo.co>.....

Yusuf, Shahnaz. 2016. **“PDB 2015, Sektor Manufaktur Berkontribusi 18,1%”**, diakses pada tanggal 9 Februari 2018 dari <http://m.bisnis.com/>.....

